



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Alamat : Jl. Mr. Syafruddin Prawira Negara Km. 7 Tanjung Pati, Kec. Harau - Kode Pos 26271  
Telp ☎. (0752) 7754203 Faks ☎. (0752) 7750136  
E-Mail : dishub50kota@gmail.com, Website : [Http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/](http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**NOMOR : 08/SK/DISHUB-LK/I/2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN BARANG/JASA**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS / PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen;
  - b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana maksud pada huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Pengguna Anggaran.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Sebagaimana Telah Empat Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan pertanggung Jawaban Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10);
22. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 64);
23. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 145 );
24. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 397 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

**Nama** : **Ir. H. ANHARMEN**

**NIP** : **19640102 199003 1 010**

**Pangkat/Golongan** : **Pembina Utama Muda / IV.c**

KEDUA : Tugas, tanggung jawab dan larangan bagi pejabat pembuat Komitmen (PPK) sebagai berikut:

1. Tugas Pokok dan kewenangan, sebagai berikut:

a. Menyusun dan Menetapkan Perencana pelaksanaan pekerjaan, termasuk pengadaan barang/jasa dan dapat berkoordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*) yang meliputi :

1. Spesifikasi teknis Barang/Jasa ;
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
3. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
4. Rancangan Kontrak;

b. Mengusulkan paket-paket pekerjaan dan/atau perubahannya kepada PA untuk

- ditetapkan;
- c. Mendampingi Unit Layanan Pengadaan pada saat melaksanakan penjelasan pekerjaan dengan penyedia barang/jasa;
  - d. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - e. Menandatangani Kontrak;
  - f. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
  - g. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
  - h. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/surat perintah kerja/surat perjanjian;
  - i. Melaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA setiap triwulan;
  - j. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
  - k. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA dengan Berita Acara Penyerahan;
  - l. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang jasa dimulai;
  - m. Menyimpan dan menjaga keutuhan rekaman dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

## 2. Tanggung Jawab

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran;
- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan berjalannya fungsi atas hasil pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.

## 3. Larangan bagi PPK

- a. Mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBD;
- b. Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan barang/jasa yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak 02 Januari 2019, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Pati  
Pada tanggal : 02 Januari 2019

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**Ir. H. ANHARMEN**  
NIP. 19640102 199003 1 010

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
4. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
5. Yang bersangkutan untuk diketahui



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Alamat : Jl. Mr. Syafruddin Prawira Negara Km. 7 Tanjung Pati, Kec. Harau - Kode Pos 26271  
Telp ☎. (0752) 7754203 Faks ☎. (0752) 7750136  
E-Mail : dishub50kota@gmail.com, Website : [Http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/](http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**  
**NOMOR : 09/SK/DISHUB-LK/I/2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS / PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019 dirasa perlu menunjuk dan menetapkan pejabat pengadaan barang/jasa;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Sebagaimana Telah Empat Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota;
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah dilingkungan kabupaten lima puluh kota tahun anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 145 );
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 397 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk pejabat pengadaan barang/jasa pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan larangan Pejabat Pengadaan sebagai berikut :
- a. Tugas pejabat pengadaan sebagai berikut :
    1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
    2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukkan langsung untuk Pengadaan Barang/Jasa lainnya dengan HPS paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
    3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukkan langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
    4. E-purchasing dengan nilai pagu paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua juta Rupiah)
  - b. Larangan pejabat pengadaan, sebagai berikut :
    1. Pejabat penadatangan surat perintah membayar (SPM) atau bendahara;
    2. PjPHP untuk paket pengadaan barang/jasa yang sama.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2019 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tanjung Pati  
Pada tanggal : 02 Januari 2019

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**Ir. H. ANHARMEN**

NIP. 19640102 199003 1 010

*Tembusan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :*

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan).
2. Sdr. Kabag. Administrasi dan Pembangunan
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
 NOMOR : 09 /SK/DISHUB-LK/I/2019  
 TANGGAL : 02 JANUARI 2019  
 TENTANG : PENUNJUKKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
 TAHUN ANGGARAN 2019

**1. Pengadaan Langsung**

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
	Bunawarman, S.Sos	Dinas Perhubungan	Pejabat Pengadaan	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	
				<b>Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	PL
				<b>Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PL
				<b>Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	PL
				<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	
				<b>Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	
				Pemeliharaan Ruangan, Dinding, Atap, Loteng, Lantai, Musholla, Papan Nama Kantor dan Perbaikan WC	PL
				<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	
				<b>Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya</b>	
				Pakaian Dinas Harian (PDH)	PL
				<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>	
				<b>Kegiatan Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)</b>	
				Belanja Meterialisasi Penerangan Jalan Umum (PJU)	Tender
				Belanja Jasa Konsultansi	PL
				Belanja Alat Listrik untuk Penerangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)	PL

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
				Upah Pekerja Listrik	PL
				<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>	
				<b>Kegiatan Uji Kelayakan Sarana transportasi Guna Keselamatan</b>	
				Belanja Bahan Penguji Kendaraan	PL
				<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>	
				<b>Kegiatan Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal</b>	
				Pengadaan Halte	PL
				Rehad Ringan Terminal Pasar Limbanang	PL
				<b>Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</b>	
				<b>Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas</b>	
				Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas dan Rambu Portabel di Nagari Situjuh Tungka Kecamatan Situjuh Limo Nagari	PL
				<b>Kegiatan Pengadaan Marka Jalan</b>	
				Pengadaan Marka Situjuh Banda Dalam, Kubang Balambak Sarilamak, Lampasi Mungka	PL
				Pengadaan Marka Zona Selamat Sekolah	PL
				<b>Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light</b>	
				Pengadaan dan Pemasangan Warning Light di Simpang SMA Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Simpang Pasar Taram	PL
				<b>Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana PJU</b>	
				Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Objek Wisata Kecamatan Harau	PL
				Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Objek Wisata Kapalo Banda Kecamatan Taram	PL
				Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Sungai Beringin Kecamatan Payakumbuh	PL
				Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Koto Puji Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh	PL

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
				Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Kubu Gadang Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh	PL
				Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Padang Parit Panjang Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh	PL
				Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Kuranji Sungai Talang Kecamatan Guguak	PL
				Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Piobang Kecamatan Guguak	PL
				Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Lancaran Singkuang Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki	PL
				Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Kurai Kecamatan Suliki	PL
				Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh	PL
				Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh	PL
				Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh	PL
				Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Koto Tengah Kecamatan Bukit Barisan	PL
				Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Indobaleh Nagari Mungo Kecamatan Luak	PL
				Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Pinang Balirik Manang Kodok, Rageh, Sibaladuang Nagari Sungai Kamunyang Kecamatan Luak	PL
				Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Tarok Nagari Andaleh Kecamatan Luak	PL
				Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Balai Panjang dan Andaleh Ampalu Kecamatan Sago Halaban	PL
				Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Labuah Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban	PL
				Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Tembok Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban	PL
				Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Kubang Rasau Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban	PL
				Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Subarang Aia Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban	PL

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
				Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Pakan Sinayan Kecamatan Lareh sago Halaban	PL
				Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Batu Bolah Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru	PL
				Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Rumbai Nagari Lubuak Alai Kecamatan Kapur IX	PL
				Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Pasar Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX	PL
				Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX	PL
				Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Lubuak Alai Kecamatan Kapur IX	PL
				Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Koto Tengah Batu Ampa (Jorong Piladang Simpang BR) Kecamatan Akabiluru	PL
				Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Koto Tengah Batu Ampa (Jorong Tambuang Ijuak / Tayuah) Kecamatan Akabiluru	PL
				Belanja Jasa Konsultansi	PL

## 2. Pengadaan Swakelola

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
1.	Bunawarman, S.Sos	Dinas Perhubungan	Pejabat Pengadaan	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Swakelola
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Swakelola
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan</b>	
				Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Swakelola
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan</b>	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Swakelola
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</b>	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Swakelola
				<b>Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Publikasi)	Swakelola				
<b>Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Swakelola				
<b>Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>					
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Swakelola				
<b>Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>					
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Swakelola				
<b>Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah</b>					
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Swakelola				
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
<b>Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Berkala</b>					
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Swakelola				

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
				<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	
				<b>Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Swakelola
				<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	
				<b>Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya</b>	
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Swakelola
				<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	
				<b>Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal</b>	
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Swakelola
				<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	
				<b>Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Swakelola
				<b>Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun</b>	
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Swakelola
				<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	
				<b>Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat</b>	
				Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Swakelola
				<b>Kegiatan Pemeliharaan Rambu, APILL, Pagar Pengaman Jalan, Pita Penggaduh dan Halte</b>	
				Pemeliharaan Rambu, APILL, Pagar Pengaman Jalan, Pita Penggaduh dan Halte	Swakelola
				<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>	
				<b>Kegiatan Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)</b>	
				Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)	Swakelola
				<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutann</b>	
				<b>Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang</b>	

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
				Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	Swakelola
				<b>Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya</b>	
				Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Swakelola
				<b>Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan</b>	
				Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan	Swakelola
				<b>Kegiatan Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan</b>	
				Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan	Swakelola
				<b>Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan</b>	
				Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Swakelola
				<b>Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan</b>	
				Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Swakelola
				<b>Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	
				Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	Swakelola
				<b>Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir / Juru Mudi Angkutan Barang dan Khusus</b>	
				Penyuluhan Bagi Para Sopir / Juru Mudi Angkutan Barang dan Khusus	Swakelola
				<b>Kegiatan Pengawasan LLAJ dan Pemanduan Perjalanan Kunjungan Kerja Bupati/Wakil Bupati dan Tamu - tamu Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota</b>	
				Pengawasan LLAJ dan Pemanduan Perjalanan Kunjungan Kerja Bupati/Wakil Bupati dan Tamu - tamu Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	Swakelola

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
				<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>	
				<b>Kegiatan Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal</b>	
				Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal	Swakelola
				<b>Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</b>	
				<b>Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas</b>	
				Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Swakelola
				<b>Kegiatan Pengadaan Marka Jalan</b>	
				Pengadaan Marka Jalan	Swakelola
				<b>Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light</b>	
				Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light	Swakelola
				<b>Kegiatan Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)</b>	
				Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)	Swakelola
				<b>Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana PJU</b>	
				Pengembangan Sarana dan Prasarana PJU	Swakelola
				<b>Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan</b>	
				Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan	Swakelola
				<b>Kegiatan Pengamanan Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir</b>	
				Pengamanan Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir	Swakelola
				<b>Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</b>	
				<b>Kegiatan Pendataan Sarana Pendukung Keselamatan Kendaraan Bermotor di Jalan</b>	
				Pendataan Sarana Pendukung Keselamatan Kendaraan Bermotor di Jalan	Swakelola

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
				<b>Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Tentang Pengoperasian Bengkel Umum Kendaraan Bermotor</b>	
				Sosialisasi/Penyuluhan Tentang Pengoperasian Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	Swakelola

Ditetapkan di : Tanjung Pati  
Pada tanggal : 02 Januari 2019

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**Ir. H. ANHARMEN**

NIP. 19640102 199003 1 010



## **PEMERINTAH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA DINAS PERHUBUNGAN**

Alamat : Jl. Mr. Syafruddin Prawira Negara Km. 7 Tanjung Pati, Kec. Harau - Kode Pos 26271

Telp ☎. (0752) 7754203 Faks ☎. (0752) 7750136

E-Mail : [dishub50kota@gmail.com](mailto:dishub50kota@gmail.com), Website : [Http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/](http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/)

---

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR : 291/SK/DISHUB-LK/II/2019**

#### **TENTANG**

#### **PENUNJUKKAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN, PEMBUAT RAB, PENGAWAS LAPANGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019**

#### **KEPALA DINAS / PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019 dirasa perlu menunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Pembuat RAB, Pengawas Lapangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2009;
  - b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana maksud pada huruf (a) diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Pengguna Anggaran.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Ingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44);
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Sebagaimana Telah Empat Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10);
24. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 145 );
25. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 397 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menunjuk personil sebagaimana tercantum pada lampiran sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Pembuat RAB, Pengawas Lapangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019 yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini

**KEDUA** : Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Pembuat RAB, Pengawas Lapangan sebagai berikut :

### **1. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)**

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Memeriksa Hasil Pekerjaan sesuai dengan Kontrak yang mencakup kesesuaian jenis, Spesifikasi teknis, jumlah/volume/kwantitas, mutu/kwalitas, waktu dan tempat penyelesaian pekerjaan;
- b. Menerima Hasil Pengadaan Setelah Melalui Pemeriksaan dan Pengujian;
- c. Membuat dan Menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

## **2. Pembuat Rencana Anggaran Biaya ( RAB )**

Pembuat Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) Memiliki Tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Membuat gambar kerja pelaksanaan. Membuat Rencana kerja dan syarat – syarat pelaksanaan bangunan ( RKS ) sebagai pedoman pelaksanaan.
- b. Membuat rencana anggaran biaya (RAB).
- c. Memproyeksikan keinginan – keinginan atau ide – ide pemilik Kegiatan ke dalam desain bangunan. Melakukan perubahan desain bila terjadi penyimpangan pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.
- d. Mempertahankan desain dalam hal adanya pihak – pihak pelaksana bangunan yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan rencana.

## **3. Pengawas Lapangan**

Pengawas Lapangan Memiliki Tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Mengadakan pengukuran (Stack out) bersama penyedia barang/jasa dan pihak terkait lainnya sebelum pekerjaan dimulai pelaksanaannya;
- b. Memberikan arahan agar pelaksanaan pekerjaan dapat sesuai dengan dokumen kontrak;
- c. Memberikan petunjuk-petunjuk teknis kepada pihak penyedia/pelaksana guna menjaga hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan jadwal waktu yang ditetapkan;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dilapangan agar tidak menyimpang dari ketentuan teknis dan gambar teknis rencana yang tercantum di dalam kontrak;
- e. Merekomendasi segera kepada Pejabat Pembuat Komitmen apabila dalam merealisasikan pekerjaan di lapangan diperlukan perubahan teknis serta item pekerjaan, sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan;
- f. Memeriksa laporan harian, laporan mingguan serta laporan bulanan pelaksanaan pekerjaan yang dibuat oleh penyedia barang/jasa atau pelaksana pekerjaan, dalam rangka penyusunan laporan berkala tentang kemajuan fisik pekerjaan;
- g. Melaksanakan pemeriksaan dan pengukuran dalam setiap tahapan pelaksanaan teknis konstruksi;
- h. Memberikan laporan sesegeranya kepada Pejabat Pembuat Komitmen apabila terdapat hambatan-hambatan yang ditemui dilapangan;
- i. Melakukan pemeriksaan akhir bersama dengan penyedia barang/jasa sebelum merekomendasikan pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 8 Februari 2019 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tanjung Pati  
Pada tanggal : 08 Februari 2018

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**Ir. H. ANHARMEN**  
NIP. 19640102 199003 1 010

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
4. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
5. Yang bersangkutan untuk diketahui

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
 NOMOR : 291/SK/DISHUB-LK/II/2019  
 TANGGAL : 08 FEBRUARI 2019  
 TENTANG : PENUNJUKKAN PANITIA/PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP), PEMBUAT RAB, PENGAWAS LAPANGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

### 1. Pengadaan Langsung

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
1	Tri Fadhli, A.Md.LLAJ/ NIP.19930303 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> <b>Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor</b> Penyediaan Alat Tulis Kantor	PL
2	Tri Fadhli, A.Md.LLAJ/ NIP.19930303 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	<b>Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b> Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PL
3	Tri Fadhli, A.Md.LLAJ/ NIP.19930303 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	<b>Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman</b> Penyediaan Makanan dan Minuman	PL
4	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001  Ajisman,ST / NIP.19681210 200701 1 008  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004 Yulia Hendri, ST / NIP. 19750721 200604 1 002	Dinas Perhubungan  Dinas Pekerjaan Umum  Dinas Perhubungan  Dinas Pekerjaan Umum	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  Perencana/ Pembuat RAB  Pengawas Lapangan  Pengawas Lapangan	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> <b>Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b> Pemeliharaan Ruangan, Dinding, Atap, Loteng, Lantai, Musholla, Papan Nama Kantor dan Perbaikan WC	PL
				<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
5	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	<b>Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya</b> Pakaian Dinas Harian (PDH)	PL
6	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002 Novi Yandri/ NIP. 19891112 200701 1 002 Yovi Gustria/ NIP. 19820816 200701 1 007 Rio Haryanto, ST/ NIP. 19781209 200501 1 006 Kimiawan Hari, ST. MT / NIP. 19780521 200501 1 008	Dinas Perhubungan  Badan Keuangan  Badan Keuangan  Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan	Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  Ketua  Sekretaris  Sekretaris  Anggota  Anggota	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b> <b>Kegiatan Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)</b> Belanja Meterialisasi Penerangan Jalan Umum (PJU)	Tender
7	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Belanja Jasa Konsultasi	PL
8	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Belanja Alat Listrik untuk Penerangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)	PL
9	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Upah Pekerja Listrik	PL
10	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Panitia penerima hasil pekerjaan	<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b> <b>Kegiatan Uji Kelayakan Sarana transportasi Guna Keselamatan</b> Belanja Bahan Penguji Kendaraan	PL
				<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b> <b>Kegiatan Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal</b>	

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
11	Tri Fadhli, A.Md.LLAJ/ NIP.19930303 201902 1 001  Ajisman,ST / NIP.19681210 200701 1 008  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Pekerjaan Umum  Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  Perencana/ Pembuat RAB  Pengawas Lapangan	Pengadaan Halte	PL
12	Tri Fadhli, A.Md.LLAJ/ NIP.19930303 201902 1 001  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Rehad Ringan Terminal Pasar Limbanang	PL
13	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001  Rusdi, ST / NIP.19680213 200604 1 003  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  Perencana/ Pembuat RAB  Pengawas Lapangan	<b>Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas</b> Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas dan Rambu Portabel di Nagari Situjuh Tungka Kecamatan Situjuh Limo Nagari	PL
14	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001  Rusdi, ST / NIP.19680213 200604 1 003  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  Perencana/ Pembuat RAB  Pengawas Lapangan	<b>Kegiatan Pengadaan Marka Jalan</b> Pengadaan Marka Situjuh Banda Dalam, Kubang Balambak Sarilamak, Lampasi Mungka	PL

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
15	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001  Rusdi, ST / NIP.19680213 200604 1 003 Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  Perencana/ Pembuat RAB  Pengawas Lapangan	Pengadaan Marka Zona Selamat Sekolah	PL
16	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	<b>Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light</b> Pengadaan dan Pemasangan Warning Light di Simpang SMA Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Simpang Pasar Taram	PL
17	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	<b>Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana PJU</b> Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Objek Wisata Kecamatan Harau	PL
18	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Objek Wisata Kapalo Banda Kecamatan Taram	PL
19	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Sungai Beringin Kecamatan Payakumbuh	PL
20	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Koto Puji Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh	PL

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
21	Tri Fadhli, A.Md.LLAJ/ NIP.19930303 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Kubu Gadang Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh	PL
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		
22	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Padang Parit Panjang Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh	PL
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		
23	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Kuranji Sungai Talang Kecamatan Guguak	PL
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		
24	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Piobang Kecamatan Guguak	PL
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		
25	Tri Fadhli, A.Md.LLAJ/ NIP.19930303 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Lancaran Singkuang Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki	PL
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		
26	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Kurai Kecamatan Suliki	PL
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		
27	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh	PL

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		
28	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh	PL
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		
29	Tri Fadhli, A.Md.LLAJ/ NIP.19930303 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh	PL
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		
30	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Koto Tengah Kecamatan Bukit Barisan	PL
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		
31	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Indobaleh Nagari Mungo Kecamatan Luak	PL
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		
32	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Pinang Balirik Manang Kodok, Rageh, Sibaladuang Nagari Sungai Kamunyang Kecamatan Luak	PL
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		
33	Tri Fadhli, A.Md.LLAJ/ NIP.19930303 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Tarok Nagari Andaleh Kecamatan Luak	PL

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		
34	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Balai Panjang dan Andaleh Ampalu Kecamatan Sago Halaban	PL
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		
35	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Labuah Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban	PL
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		
36	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Tembok Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban	PL
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		
37	Tri Fadhli, A.Md.LLAJ/ NIP.19930303 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Kubang Rasau Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban	PL
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		
38	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Subarang Aia Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban	PL
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
39	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Pakan Sinayan Kecamatan Lareh sago Halaban	PL
40	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Batu Bolah Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru	PL
41	Tri Fadhli, A.Md.LLAJ/ NIP.19930303 201902 1 001  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Rumbai Nagari Lubuak Alai Kecamatan Kapur IX	PL
42	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Pasar Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX	PL
43	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX	PL
44	Akhyar,SE,MM/ NIP.19690826 199312 1 002 Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Lubuak Alai Kecamatan Kapur IX	PL

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
45	Tri Fadhli, A.Md.LLAJ/ NIP.19930303 201902 1 001  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Koto Tengah Batu Ampa (Jorong Piladang Simpang BR) Kecamatan Akabiluru	PL
46	Akhyar,SE,MM/ NIP.19690826 199312 1 002  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Koto Tengah Batu Ampa (Jorong Tambuang Ijuak / Tayuah) Kecamatan Akabiluru	PL
47	Akhyar,SE,MM/ NIP.19690826 199312 1 002  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Belanja Jasa Konsultansi	PL

## 2. Pengadaan Swakelola

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
1.	Alfin Kholis, A.Md.LLAJ/ NIP. 19970318 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b> Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Swakelola
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Swakelola
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan</b> Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Swakelola
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Swakelola
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</b> Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Swakelola
				<b>Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b> Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Publikasi)	Swakelola
				<b>Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Swakelola
				<b>Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Swakelola
				<b>Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b> Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Swakelola
				<b>Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah</b> Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Swakelola
				<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> <b>Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Berkala</b>	

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> <b>Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b> Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Swakelola
				<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b> <b>Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya</b> Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Swakelola
				<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b> <b>Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal</b> Pendidikan dan Pelatihan Formal	Swakelola
				<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> <b>Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b> Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Swakelola
				<b>Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun</b> Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Swakelola
				<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b> <b>Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat</b> Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Swakelola
				<b>Kegiatan Pemeliharaan Rambu, APILL, Pagar Pengaman Jalan, Pita Penggaduh dan Halte</b> Pemeliharaan Rambu, APILL, Pagar Pengaman Jalan, Pita Penggaduh dan Halte	Swakelola
				<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b> <b>Kegiatan Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)</b>	

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
				Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)	Swakelola
				<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b> <b>Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang</b> Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	Swakelola
				<b>Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya</b> Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Swakelola
				<b>Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan</b> Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan	Swakelola
				<b>Kegiatan Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan</b> Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan	Swakelola
				<b>Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan</b> Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Swakelola
				<b>Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan</b> Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Swakelola
				<b>Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan</b> Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	Swakelola
				<b>Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir / Juru Mudi Angkutan Barang dan Khusus</b> Penyuluhan Bagi Para Sopir / Juru Mudi Angkutan Barang dan Khusus	Swakelola
				<b>Kegiatan Pengawasan LLAJ dan Pemanduan Perjalanan Kunjungan Kerja Bupati/Wakil Bupati dan Tamu - tamu Pemerintah Kabupaten</b>	

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
				<b>Lima Puluh Kota</b> Pengawasan LLAJ dan Pemanduan Perjalanan Kunjungan Kerja Bupati/Wakil Bupati dan Tamu - tamu Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota <b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b> <b>Kegiatan Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal</b> Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal	Swakelola
				<b>Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</b> <b>Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas</b> Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Swakelola
				<b>Kegiatan Pengadaan Marka Jalan</b> Pengadaan Marka Jalan	Swakelola
				<b>Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light</b> Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light	Swakelola
				<b>Kegiatan Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)</b> Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)	Swakelola
				<b>Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana PJU</b> Pengembangan Sarana dan Prasarana PJU	Swakelola
				<b>Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan</b> Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan	Swakelola
				<b>Kegiatan Pengamanan Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir</b> Pengamanan Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir	Swakelola
				<b>Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</b> <b>Kegiatan Pendataan Sarana Pendukung Keselamatan Kendaraan Bermotor di Jalan</b>	

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
				Pendataan Sarana Pendukung Keselamatan Kendaraan Bermotor di Jalan	Swakelola
				<b>Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Tentang Pengoperasian Bengkel Umum Kendaraan Bermotor</b> Sosialisasi/Penyuluhan Tentang Pengoperasian Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	Swakelola

Ditetapkan di : Tanjung Pati  
Pada tanggal : 08 Februari 2019

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**Ir. H. ANHARMEN**  
NIP. 19640102 199003 1 010



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Alamat : Jl. Mr. Syafruddin Prawira Negara Km. 7 Tanjung Pati, Kec. Harau - Kode Pos 26271

Telp ☎. (0752) 7754203 Faks ☎. (0752) 7750136

E-Mail : [dishub50kota@gmail.com](mailto:dishub50kota@gmail.com), Website : [Http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/](http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**NOMOR : 349/SK/DISHUB-LK/V/2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PENUNJUKKAN PANITIA/PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP), PEMBUAT RAB, PENGAWAS LAPANGAN  
NOMOR : 291 /SK/DISHUB-LK/II/2019 TANGGAL 8 FEBRUARI 2019  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS / PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019 dirasa perlu menunjuk Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Pembuat RAB, Pengawas Lapangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana maksud pada huruf (a) diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Pengguna Anggaran.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Ingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44);
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua

- kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Sebagaimana Telah Empat Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara) ;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10);
24. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 145 );
25. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 397 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menunjuk personil sebagaimana tercantum pada lampiran sebagai Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Pembuat RAB, Pengawas Lapangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019 yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini

**KEDUA** : Tugas pokok dan kewenangan Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Pembuat RAB, Pengawas Lapangan sebagai berikut :

**1. Panitia/ Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)**

Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Memeriksa Hasil Administratif terhadap barang/jasa yang akan di serah

terimakan berdasarkan permintaan pengguna Anggaran (PA):

- b. Membuat dan Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Administratif.

## **2. Pembuat Rencana Anggaran Biaya ( RAB )**

Pembuat Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) Memiliki Tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Membuat gambar kerja pelaksanaan. Membuat Rencana kerja dan syarat – syarat pelaksanaan bangunan ( RKS ) sebagai pedoman pelaksanaan.
- b. Membuat rencana anggaran biaya (RAB).
- c. Memproyeksikan keinginan – keinginan atau ide – ide pemilik Kegiatan ke dalam desain bangunan. Melakukan perubahan desain bila terjadi penyimpangan pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.
- d. Mempertahankan desain dalam hal adanya pihak – pihak pelaksana bangunan yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan rencana.

## **3. Pengawas Lapangan**

Pengawas Lapangan Memiliki Tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Mengadakan pengukuran (Stack out) bersama penyedia barang/jasa dan pihak terkait lainnya sebelum pekerjaan dimulai pelaksanaannya;
- b. Memberikan arahan agar pelaksanaan pekerjaan dapat sesuai dengan dokumen kontrak;
- c. Memberikan petunjuk-petunjuk teknis kepada pihak penyedia/pelaksana guna menjaga hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan jadwal waktu yang ditetapkan;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dilapangan agar tidak menyimpang dari ketentuan teknis dan gambar teknis rencana yang tercantum di dalam kontrak;
- e. Merekomendasi segera kepada Pejabat Pembuat Komitmen apabila dalam merealisasikan pekerjaan di lapangan diperlukan perubahan teknis serta item pekerjaan, sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan;
- f. Memeriksa laporan harian, laporan mingguan serta laporan bulanan pelaksanaan pekerjaan yang dibuat oleh penyedia barang/jasa atau pelaksana pekerjaan, dalam rangka penyusunan laporan berkala tentang kemajuan fisik pekerjaan;
- g. Melaksanakan pemeriksaan dan pengukuran dalam setiap tahapan pelaksanaan teknis kontruksi;
- h. Memberikan laporan sesegeranya kepada Pejabat Pembuat Komitmen apabila terdapat hambatan-hambatan yang ditemui dilapangan;
- i. Melakukan pemeriksaan akhir bersama dengan penyedia barang/jasa sebelum merekomendasikan pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2019.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Mei 2019 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tanjung Pati  
Pada tanggal : 31 Mei 2019

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**Ir. H. ANHARMEN**  
NIP. 19640102 199003 1 010

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
4. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
5. Yang bersangkutan untuk diketahui

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
 NOMOR : 349/SK/DISHUB-LK/V/2019  
 TANGGAL : 31 MEI 2019  
 TENTANG : PERUBAHAN PERTAMA PENUNJUKKAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN, PEMBUAT RAB, PENGAWAS LAPANGAN NOMOR :291/SK/DISHUB-LK/II/2019 TANGGAL 08 FEBRUARIU 2019 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

### 1. Pengadaan Langsung

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
1	Tri Fadhli, A.Md.LLAJ/ NIP.19930303 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> <b>Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor</b> Penyediaan Alat Tulis Kantor	PL
2	Tri Fadhli, A.Md.LLAJ/ NIP.19930303 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	<b>Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b> Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PL
3	Tri Fadhli, A.Md.LLAJ/ NIP.19930303 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	<b>Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman</b> Penyediaan Makanan dan Minuman	PL
4	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001  Ajisman,ST / NIP.19681210 200701 1 008 Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004 Yulia Hendri, ST / NIP. 19750721 200604 1 002	Dinas Perhubungan  Dinas Pekerjaan Umum  Dinas Perhubungan  Dinas Pekerjaan Umum	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  Perencana/ Pembuat RAB  Pengawas Lapangan  Pengawas Lapangan	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> <b>Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b> Pemeliharaan Ruangan, Dinding, Atap, Loteng, Lantai, Musholla, Papan Nama Kantor dan Perbaikan WC	PL

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
5	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b> <b>Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya</b> Pakaian Dinas Harian (PDH)	PL
6	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002 Novi Yandri/ NIP. 19891112 200701 1 002 Yovi Gustria/ NIP. 19820816 200701 1 007 Rio Haryanto, ST/ NIP. 19781209 200501 1 006 Kimiawan Hari, ST. MT / NIP. 19780521 200501 1 008	Dinas Perhubungan  Badan Keuangan  Badan Keuangan  Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan	Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  Ketua  Sekretaris  Sekretaris  Anggota  Anggota	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas</b> <b>LLAJ</b> <b>Kegiatan Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)</b> Belanja Meterialisasi Penerangan Jalan Umum (PJU)	Tender
7	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Belanja Jasa Konsultansi	PL
8	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Belanja Alat Listrik untuk Penerangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)	PL
9	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Upah Pekerja Listrik	PL
10	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Panitia penerima hasil pekerjaan	<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b> <b>Kegiatan Uji Kelayakan Sarana transportasi Guna Keselamatan</b> Belanja Bahan Penguji Kendaraan	PL

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
11	Tri Fadhli, A.Md.LLAJ/ NIP.19930303 201902 1 001  Ajisman,ST / NIP.19681210 200701 1 008  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Pekerjaan Umum  Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  Perencana/ Pembuat RAB  Pengawas Lapangan	<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b> <b>Kegiatan Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal</b> Pengadaan Halte	PL
12	Tri Fadhli, A.Md.LLAJ/ NIP.19930303 201902 1 001  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Rehad Ringan Terminal Pasar Limbanang	PL
13	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001  Rusdi, ST / NIP.19680213 200604 1 003  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  Perencana/ Pembuat RAB  Pengawas Lapangan	<b>Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</b> <b>Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas</b> Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas dan Rambu Portabel di Nagari Situjuh Tungka Kecamatan Situjuh Limo Nagari	PL
14	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001  Rusdi, ST / NIP.19680213 200604 1 003	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  Perencana/ Pembuat RAB	<b>Kegiatan Pengadaan Marka Jalan</b> Pengadaan Marka Situjuh Banda Dalam, Kubang Balambak Sarilamak, Lampasi Mungka	PL

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		
15	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Pengadaan Marka Zona Selamat Sekolah	PL
	Rusdi, ST / NIP.19680213 200604 1 003	Dinas Perhubungan	Perencana/ Pembuat RAB		
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		
16	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	<b>Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light</b> Pengadaan dan Pemasangan Warning Light di Simpang SMA Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Simpang Pasar Taram	PL
17	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	<b>Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana PJU</b> Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Objek Wisata Kecamatan Harau	PL
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		
18	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Objek Wisata Kapalo Banda Kecamatan Taram	PL
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		
19	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Sungai Beringin Kecamatan Payakumbuh	PL
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
20	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Koto Puji Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh	PL
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		
21	Tri Fadhli, A.Md.LLAJ/ NIP.19930303 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Kubu Gadang Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh	PL
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		
22	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Padang Parit Panjang Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh	PL
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		
23	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Kuranji Sungai Talang Kecamatan Guguak	PL
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		
24	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Piobang Kecamatan Guguak	PL
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		
25	Tri Fadhli, A.Md.LLAJ/ NIP.19930303 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Lancaran Singkuang Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki	PL
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
26	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Kurai Kecamatan Suliki	PL
27	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh	PL
28	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh	PL
29	Tri Fadhli, A.Md.LLAJ/ NIP.19930303 201902 1 001  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh	PL
30	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Koto Tengah Kecamatan Bukit Barisan	PL
31	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Indobaleh Nagari Mungo Kecamatan Luak	PL

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
32	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Pinang Balirik Manang Kodok, Rageh, Sibaladuang Nagari Sungai Kamunyang Kecamatan Luak	PL
33	Tri Fadhli, A.Md.LLAJ/ NIP.19930303 201902 1 001  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Tarok Nagari Andaleh Kecamatan Luak	PL
34	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Balai Panjang dan Andaleh Ampalu Kecamatan Sago Halaban	PL
35	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Labuah Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban	PL
36	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Tembok Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban	PL
37	Tri Fadhli, A.Md.LLAJ/ NIP.19930303 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Kubang Rasau Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban	PL

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
38	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Subarang Aia Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban	PL
	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan		
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		
39	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Pakan Sinayan Kecamatan Lareh sago Halaban	PL
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		
40	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Batu Bolah Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru	PL
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		
41	Tri Fadhli, A.Md.LLAJ/ NIP.19930303 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Rumbai Nagari Lubuak Alai Kecamatan Kapur IX	PL
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		
42	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Pasar Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX	PL
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
43	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX	PL
44	Akhyar,SE,MM/ NIP.19690826 199312 1 002 Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Lubuak Alai Kecamatan Kapur IX	PL
45	Tri Fadhli, A.Md.LLAJ/ NIP.19930303 201902 1 001  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Koto Tengah Batu Ampa (Jorong Piladang Simpang BR) Kecamatan Akabiluru	PL
46	Akhyar,SE,MM/ NIP.19690826 199312 1 002  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Koto Tengah Batu Ampa (Jorong Tambuang Ijuak / Tayuah) Kecamatan Akabiluru	PL
47	Akhyar,SE,MM/ NIP.19690826 199312 1 002  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Belanja Jasa Konsultansi	PL

## 2. Pengadaan Swakelola

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
1.	AR Edo Samara, S.S.T (TD) NIP. 19951008 201804 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b> Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Swakelola
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Swakelola
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan</b> Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Swakelola
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Swakelola
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</b> Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Swakelola
				<b>Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b> Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Publikasi)	Swakelola
				<b>Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Swakelola
				<b>Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Swakelola
				<b>Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b> Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Swakelola
				<b>Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah</b> Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Swakelola
				<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
				<b>Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Berkala</b> Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> <b>Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b> Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Swakelola  Swakelola
				<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b> <b>Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya</b> Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Swakelola
				<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b> <b>Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal</b> Pendidikan dan Pelatihan Formal	Swakelola
				<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> <b>Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b> Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Swakelola
				<b>Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun</b> Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Swakelola
				<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b> <b>Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat</b> Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Swakelola
				<b>Kegiatan Pemeliharaan Rambu, APILL, Pagar Pengaman Jalan, Pita Penggaduh dan Halte</b> Pemeliharaan Rambu, APILL, Pagar Pengaman Jalan, Pita Penggaduh dan Halte	Swakelola
				<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b> <b>Kegiatan Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)</b>	

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
				Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)	Swakelola
				<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b> <b>Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang</b> Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	Swakelola
				<b>Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya</b> Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Swakelola
				<b>Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan</b> Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan	Swakelola
				<b>Kegiatan Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan</b> Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan	Swakelola
				<b>Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan</b> Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Swakelola
				<b>Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan</b> Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Swakelola
				<b>Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan</b> Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	Swakelola
				<b>Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir / Juru Mudi Angkutan Barang dan Khusus</b> Penyuluhan Bagi Para Sopir / Juru Mudi Angkutan Barang dan Khusus	Swakelola
				<b>Kegiatan Pengawasan LLAJ dan Pemanduan Perjalanan Kunjungan Kerja Bupati/Wakil Bupati dan Tamu - tamu Pemerintah Kabupaten</b>	

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
				<b>Lima Puluh Kota</b> Pengawasan LLAJ dan Pemanduan Perjalanan Kunjungan Kerja Bupati/Wakil Bupati dan Tamu - tamu Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota <b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b> <b>Kegiatan Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal</b> Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal	Swakelola
				<b>Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</b> <b>Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas</b> Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Swakelola
				<b>Kegiatan Pengadaan Marka Jalan</b> Pengadaan Marka Jalan	Swakelola
				<b>Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light</b> Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light	Swakelola
				<b>Kegiatan Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)</b> Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)	Swakelola
				<b>Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana PJU</b> Pengembangan Sarana dan Prasarana PJU	Swakelola
				<b>Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan</b> Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan	Swakelola
				<b>Kegiatan Pengamanan Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir</b> Pengamanan Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir	Swakelola
				<b>Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</b> <b>Kegiatan Pendataan Sarana Pendukung Keselamatan Kendaraan Bermotor di Jalan</b>	

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
				Pendataan Sarana Pendukung Keselamatan Kendaraan Bermotor di Jalan	Swakelola
				<b>Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Tentang Pengoperasian Bengkel Umum Kendaraan Bermotor</b> Sosialisasi/Penyuluhan Tentang Pengoperasian Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	Swakelola

Ditetapkan di : Tanjung Pati

Pada tanggal : 31 Mei 2019

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**Ir. H. ANHARMEN**

NIP. 19640102 199003 1 010



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Alamat : Jl. Mr. Syafruddin Prawira Negara Km. 7 Tanjung Pati, Kec. Harau - Kode Pos 26271  
Telp ☎. (0752) 7754203 Faks ☎. (0752) 7750136  
E-Mail : [dishub50kota@gmail.com](mailto:dishub50kota@gmail.com), Website : [Http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/](http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**NOMOR : 389/SK/DISHUB-LK/X/2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA PENUNJUKKAN PANITIA/PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP), PEMBUAT RAB, PENGAWAS LAPANGAN NOMOR : 349 /SK/DISHUB-LK/V/2019 TANGGAL 31 MEI 2019 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS / PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019 dirasa perlu menunjuk Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Pembuat RAB, Pengawas Lapangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana maksud pada huruf (a) diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Pengguna Anggaran.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Ingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44);
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua

- kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Sebagaimana Telah Empat Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara) ;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10);
24. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 145 );
25. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 397 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menunjuk personil sebagaimana tercantum pada lampiran sebagai Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Pembuat RAB, Pengawas Lapangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019 yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini

**KEDUA** : Tugas pokok dan kewenangan Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Pembuat RAB, Pengawas Lapangan sebagai berikut :

**1. Panitia/ Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)**

Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Memeriksa Hasil Administratif terhadap barang/jasa yang akan di serah

terimakan berdasarkan permintaan pengguna Anggaran (PA):

- b. Membuat dan Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Administratif.

## **2. Pembuat Rencana Anggaran Biaya ( RAB )**

Pembuat Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) Memiliki Tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Membuat gambar kerja pelaksanaan. Membuat Rencana kerja dan syarat – syarat pelaksanaan bangunan ( RKS ) sebagai pedoman pelaksanaan.
- b. Membuat rencana anggaran biaya (RAB).
- c. Memproyeksikan keinginan – keinginan atau ide – ide pemilik Kegiatan ke dalam desain bangunan. Melakukan perubahan desain bila terjadi penyimpangan pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.
- d. Mempertahankan desain dalam hal adanya pihak – pihak pelaksana bangunan yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan rencana.

## **3. Pengawas Lapangan**

Pengawas Lapangan Memiliki Tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Mengadakan pengukuran (Stack out) bersama penyedia barang/jasa dan pihak terkait lainnya sebelum pekerjaan dimulai pelaksanaannya;
- b. Memberikan arahan agar pelaksanaan pekerjaan dapat sesuai dengan dokumen kontrak;
- c. Memberikan petunjuk-petunjuk teknis kepada pihak penyedia/pelaksana guna menjaga hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan jadwal waktu yang ditetapkan;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dilapangan agar tidak menyimpang dari ketentuan teknis dan gambar teknis rencana yang tercantum di dalam kontrak;
- e. Merekomendasi segera kepada Pejabat Pembuat Komitmen apabila dalam merealisasikan pekerjaan di lapangan diperlukan perubahan teknis serta item pekerjaan, sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan;
- f. Memeriksa laporan harian, laporan mingguan serta laporan bulanan pelaksanaan pekerjaan yang dibuat oleh penyedia barang/jasa atau pelaksana pekerjaan, dalam rangka penyusunan laporan berkala tentang kemajuan fisik pekerjaan;
- g. Melaksanakan pemeriksaan dan pengukuran dalam setiap tahapan pelaksanaan teknis kontruksi;
- h. Memberikan laporan sesegeranya kepada Pejabat Pembuat Komitmen apabila terdapat hambatan-hambatan yang ditemui dilapangan;
- i. Melakukan pemeriksaan akhir bersama dengan penyedia barang/jasa sebelum merekomendasikan pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2019 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tanjung Pati  
Pada tanggal : 01 Oktober 2019

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**Ir. H. ANHARMEN**  
NIP. 19640102 199003 1 010

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
4. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
5. Yang bersangkutan untuk diketahui

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
 NOMOR : 389/SK/DISHUB-LK/X/2019  
 TANGGAL : 01 OKTOBER 2019  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA PENUNJUKKAN PANITIA/PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP), PEMBUAT RAB, PENGAWAS LAPANGAN NOMOR : 349/SK/DISHUB-LK/V/2019 TANGGAL 31 MEI 2019 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

### 1. Pengadaan Langsung

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
1	Tri Fadhli, A.Md.LLAJ/ NIP.19930303 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> <b>Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor</b> Penyediaan Alat Tulis Kantor	PL
2	Tri Fadhli, A.Md.LLAJ/ NIP.19930303 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	<b>Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b> Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PL
3	Tri Fadhli, A.Md.LLAJ/ NIP.19930303 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	<b>Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman</b> Penyediaan Makanan dan Minuman	PL
4	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001  Ajisman,ST / NIP.19681210 200701 1 008 Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004 Yulia Hendri, ST / NIP. 19750721 200604 1 002	Dinas Perhubungan  Dinas Pekerjaan Umum  Dinas Perhubungan  Dinas Pekerjaan Umum	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan  Perencana/ Pembuat RAB  Pengawas Lapangan  Pengawas Lapangan	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> <b>Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b> Pemeliharaan Ruangan, Dinding, Atap, Loteng, Lantai, Musholla, Papan Nama Kantor dan Perbaikan WC	PL

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
5	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b> <b>Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya</b> Pakaian Dinas Harian (PDH)	PL
6	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002  Boy Chandra, S.Sos/ NIP.19740226 200701 1 006	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas</b> <b>LLAJ</b> <b>Kegiatan Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)</b> Belanja Meterialisasi Penerangan Jalan Umum (PJU)	Tender
7	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002	Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	Belanja Jasa Konsultansi	PL
8	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002	Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	Belanja Alat Listrik untuk Penerangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)	PL
9	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	Upah Pekerja Listrik	PL
10	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b> <b>Kegiatan Uji Kelayakan Sarana transportasi Guna Keselamatan</b> Belanja Bahan Penguji Kendaraan	PL
11	Tri Fadhli, A.Md.LLAJ/ NIP.19930303 201902 1 001  Ajisman,ST / NIP.19681210 200701 1 008	Dinas Perhubungan  Dinas Pekerjaan Umum	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan  Perencana/ Pembuat RAB	<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b> <b>Kegiatan Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal</b> Pengadaan Halte	PL

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		
12	Tri Fadhli, A.Md.LLAJ/ NIP.19930303 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	Rehad Ringan Terminal Pasar Limbanang	PL
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		
13	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	<b>Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas</b> Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas dan Rambu Portabel di Nagari Situjuh Tungka Kecamatan Situjuh Limo Nagari	PL
	Rusdi, ST / NIP.19680213 200604 1 003	Dinas Perhubungan	Perencana/ Pembuat RAB		
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		
14	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	<b>Kegiatan Pengadaan Marka Jalan</b> Pengadaan Marka Situjuh Banda Dalam, Kubang Balambak Sarilamak, Lampasi Mungka	PL
	Rusdi, ST / NIP.19680213 200604 1 003	Dinas Perhubungan	Perencana/ Pembuat RAB		
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		
15	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	Pengadaan Marka Zona Selamat Sekolah	PL

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
	Rusdi, ST / NIP.19680213 200604 1 003 Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Perencana/ Pembuat RAB  Pengawas Lapangan		
16	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	<b>Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light</b> Pengadaan dan Pemasangan Warning Light di Simpang SMA Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Simpang Pasar Taram	PL
17	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	<b>Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana PJU</b> Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Objek Wisata Kecamatan Harau	PL
18	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Objek Wisata Kapalo Banda Kecamatan Taram	PL
19	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Sungai Beringin Kecamatan Payakumbuh	PL
20	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Koto Puji Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh	PL

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
21	Tri Fadhli, A.Md.LLAJ/ NIP.19930303 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Kubu Gadang Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh	PL
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		
22	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002	Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Padang Parit Panjang Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh	PL
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		
23	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Kuranji Sungai Talang Kecamatan Guguak	PL
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		
24	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002	Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Piobang Kecamatan Guguak	PL
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		
25	Tri Fadhli, A.Md.LLAJ/ NIP.19930303 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Lancaran Singkuang Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki	PL
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		
26	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002	Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Kurai Kecamatan Suliki	PL
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
27	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh	PL
28	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh	PL
29	Tri Fadhli, A.Md.LLAJ/ NIP.19930303 201902 1 001  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh	PL
30	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Koto Tengah Kecamatan Bukit Barisan	PL
31	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Indobaleh Nagari Mungo Kecamatan Luak	PL
32	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Pinang Balirik Manang Kodok, Rageh, Sibaladuang Nagari Sungai Kamunyang Kecamatan Luak	PL

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
33	Tri Fadhli, A.Md.LLAJ/ NIP.19930303 201902 1 001  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Tarok Nagari Andaleh Kecamatan Luak	PL
34	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Balai Panjang dan Andaleh Ampalu Kecamatan Sago Halaban	PL
35	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Labuah Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban	PL
36	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Tembok Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban	PL
37	Tri Fadhli, A.Md.LLAJ/ NIP.19930303 201902 1 001  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Kubang Rasau Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban	PL
38	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002	Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Subarang Aia Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban	PL

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		
39	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Pakan Sinayan Kecamatan Lareh sago Halaban	PL
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		
40	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002	Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Batu Bolah Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru	PL
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		
41	Tri Fadhli, A.Md.LLAJ/ NIP.19930303 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Jorong Rumbai Nagari Lubuak Alai Kecamatan Kapur IX	PL
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		
42	Akhyar,SE,MM / NIP.19690826 199312 1 002	Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Pasar Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX	PL
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		
43	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ / NIP.19961112 201902 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX	PL
	Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan	Pengawas Lapangan		

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
44	Akhyar,SE,MM/ NIP.19690826 199312 1 002 Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Lubuak Alai Kecamatan Kapur IX	PL
45	Tri Fadhli, A.Md.LLAJ/ NIP.19930303 201902 1 001  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Koto Tengah Batu Ampa (Jorong Piladang Simpang BR) Kecamatan Akabiluru	PL
46	Akhyar,SE,MM/ NIP.19690826 199312 1 002  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Solar Cell Nagari Koto Tengah Batu Ampa (Jorong Tambuang Ijuak / Tayuah) Kecamatan Akabiluru	PL
47	Akhyar,SE,MM/ NIP.19690826 199312 1 002  Riko Saputra / NIP.19820923 201001 1 004	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan  Pengawas Lapangan	Belanja Jasa Konsultansi	PL

## 2. Pengadaan Swakelola

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
1.	AR Edo Samara, S.S.T (TD) NIP. 19951008 201804 1 001	Dinas Perhubungan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b> Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Swakelola
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Swakelola
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan</b> Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Swakelola
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Swakelola
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</b> Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Swakelola
				<b>Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b> Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Publikasi)	Swakelola
				<b>Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Swakelola
				<b>Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Swakelola
				<b>Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b> Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Swakelola
<b>Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah</b> Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Swakelola				

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
				<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> <b>Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Berkala</b> Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Swakelola
				<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> <b>Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b> Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Swakelola
				<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b> <b>Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya</b> Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Swakelola
				<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b> <b>Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal</b> Pendidikan dan Pelatihan Formal	Swakelola
				<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> <b>Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b> Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Swakelola
				<b>Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun</b> Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Swakelola
				<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b> <b>Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat</b> Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Swakelola
				<b>Kegiatan Pemeliharaan Rambu, APILL, Pagar Pengaman Jalan, Pita Penggaduh dan Halte</b> Pemeliharaan Rambu, APILL, Pagar Pengaman Jalan, Pita Penggaduh dan Halte	Swakelola

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
				<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b> <b>Kegiatan Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)</b> Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)	Swakelola
				<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b> <b>Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang</b> Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	Swakelola
				<b>Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya</b> Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Swakelola
				<b>Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan</b> Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan	Swakelola
				<b>Kegiatan Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan</b> Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan	Swakelola
				<b>Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan</b> Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Swakelola
				<b>Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan</b> Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Swakelola
				<b>Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan</b> Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	Swakelola
				<b>Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir / Juru Mudi Angkutan Barang dan Khusus</b> Penyuluhan Bagi Para Sopir / Juru Mudi Angkutan Barang dan Khusus	Swakelola

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
				<b>Kegiatan Pengawasan LLAJ dan Pemanduan Perjalanan Kunjungan Kerja Bupati/Wakil Bupati dan Tamu - tamu Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota</b> Pengawasan LLAJ dan Pemanduan Perjalanan Kunjungan Kerja Bupati/Wakil Bupati dan Tamu - tamu Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	Swakelola
				<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kegiatan Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal</b> Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal	Swakelola
				<b>Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas</b> Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Swakelola
				<b>Kegiatan Pengadaan Marka Jalan</b> Pengadaan Marka Jalan	Swakelola
				<b>Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light</b> Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light	Swakelola
				<b>Kegiatan Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)</b> Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)	Swakelola
				<b>Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana PJU</b> Pengembangan Sarana dan Prasarana PJU	Swakelola
				<b>Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan</b> Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan	Swakelola
				<b>Kegiatan Pengamanan Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir</b> Pengamanan Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir	Swakelola

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN / PEKERJAAN	KETERANGAN
				<b>Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Kegiatan Pendataan Sarana Pendukung Keselamatan Kendaraan Bermotor di Jalan</b> Pendataan Sarana Pendukung Keselamatan Kendaraan Bermotor di Jalan	Swakelola
				<b>Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Tentang Pengoperasian Bengkel Umum Kendaraan Bermotor</b> Sosialisasi/ Penyuluhan Tentang Pengoperasian Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	Swakelola

Ditetapkan di : Tanjung Pati  
 Pada tanggal : 01 Oktober 2019

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**Ir. H. ANHARMEN**  
 NIP. 19640102 199003 1 010



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Alamat : Jl. Mr. Syafruddin Prawira Negara Km. 7 Tanjung Pati, Kec. Harau - Kode Pos 26271  
Telp ☎. (0752) 7754203 Faks ☎. (0752) 7750136  
E-Mail : dishub50kota@gmail.com, Website : [Http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/](http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS / PENGGUNA ANGGARAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR : 551/ 03 /KEP/DISHUB-LK/I/2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)**  
**DAN PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS / PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019, perlu ditunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan / Pengguna Anggaran Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Nomor 4438);
  5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah dua kali di ubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan Serta Penyampiannya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. ( Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 64);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 145 );
15. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 397 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan kesatuan utuh dengan keputusan ini;

**KEDUA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK-OPD) bertugas sebagai berikut :

- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang di sampaikan oleh Bendahara pengeluaran dan diketahui/ditetujui oleh PPTK;
- b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, an SPP-LS gaji dan tunjangan ASN serta penghasilan lainnya yang di tetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang di ajukan oleh Bendahara Pengeluaran
- c. Melakukan verifikasi SPP dan SPJ;

- d. Menyiapkan SPM;
- e. Melakukan verifikasi Permintaan Dana dan SPJ dari Bidang;
- f. Melakukan akuntansi Pengelolaan Keuangan OPD;
- g. Menyiapkan laporan Keuangan OPD;

Pembantu PPK-OPD bertugas sebagai berikut :

- a. Membantu meneliti SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Membantu meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, an SPP-LS Gaji;
- c. Membantu Melakukan verifikasi SPP dan SPJ;
- d. Membantu Menyiapkan SPM;
- e. Membantu melakukan verifikasi Laporan dan Perencanaan;
- f. Membantu melakukan akuntansi OPD;
- g. Membantu melakukan laporan keuangan OPD;

- KETIGA** : Pejabat Pentausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK-OPD) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tanjung Pati  
Pada tanggal : 02 Januari 2019

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**Ir. H. ANHARMEN**  
NIP. 19640102 199003 1 010

Tembusan kepada Yth :

1. Bpk Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan).
2. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia di Sarilamak
3. Sdr. Kepala Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
4. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Ketinggian.
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS/PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR : 551/ 03 /DISHUB-LK/I/2019  
TANGGAL : 02 JANUARI 2019  
TENTANG : PENUNJUKKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

No	NAMA / NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	Afrizon,S.ST NIP.19631018 198709 1 001	Pejabat Penatausahaan Keuangan	
2	Alwin Kusuma Eryana, S.S.T (TD) NIP.19930307 201612 1 001	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	

Ditetapkan di :Tanjung Pati  
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**Ir. H. ANHARMEN**  
NIP. 19640102 199003 1 010



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Alamat : Jl. Mr. Syafruddin Prawira Negara Km. 7 Tanjung Pati, Kec. Harau - Kode Pos 26271  
Telp ☎. (0752) 7754203 Faks 📠. (0752) 7750136  
E-Mail : dishub50kota@gmail.com, Website : [Http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/](http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS / PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR : 551/ 04 /KEP/DISHUB-LK/I/2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS / PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019, dipandang perlu menetapkan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf (a) di atas, dipandang perlu menetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Perhubungan / Pengguna Anggaran Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Nomor 4438);
  5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah dua kali di ubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan Serta Penyampaiannya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 64);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 145 );
15. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 397 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
**PERTAMA** : Menetapkan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana tercantum dalam daftar dibawah ini :

No	Nama	NIP	Jabatan	Ket
1	Yesi Yulita, S.Sos	19820724 200901 2 004	Pembantu Bendahara Pengeluaran	
2	Pra Aidil	19770907 200801 1 004	Pembantu Bendahara Pengeluaran	

**KEDUA** : Pembantu Bendahara Pengeluaran bertugas untuk membantu bendahara pengeluaran sebagai pembuat dokumen pengeluaran uang (Pembuat SPP LS, SPP Gaji, SPP GU/TU/UP dan menertibkan administrasi pembukuan keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tanjung Pati  
Pada tanggal : 02 Januari 2019

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**Ir. H. ANHARMEN**

NIP. 19640102 199003 1 010

Tembusan kepada Yth :

1. Bpk Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan).
2. Sdr. Kepala Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
3. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Ketinggian.
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



## **PPEMERINTAH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA DINAS PERHUBUNGAN**

Alamat : Jl. Mr. Syafruddin Prawira Negara Km. 7 Tanjung Pati, Kec. Harau - Kode Pos 26271

Telp ☎. (0752) 7754203 Faks ☎. (0752) 7750136

E-Mail : dishub50kota@gmail.com, Website : [Http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/](http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/)

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS / PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR : 551/350/KEP/DISHUB-LK/V/2019**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PENUNJUKKAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN  
NOMOR : 551/04/KEP/DISHUB-LK/I/2019 TANGGAL 2 JANUARI 2019  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2019**

#### **KEPALA DINAS / PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019, dipandang perlu menetapkan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf (a) di atas, dipandang perlu menetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Perhubungan / Pengguna Anggaran Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Nomor 4438);
  5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah dua kali di ubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan Serta Penyampaiannya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 64);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 145) ;
15. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 397 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
**PERTAMA** : Menetapkan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana tercantum dalam daftar dibawah ini :

No	Nama	NIP	Jabatan	Ket
1	Yesi Yulita, S.Sos	19820724 200901 2 004	Pembantu Bendahara Pengeluaran	
2	Alfin Kholis, A.Md. LLAJ	19970318 201902 1 001	Pembantu Bendahara Pengeluaran	

**KEDUA** : Pembantu Bendahara Pengeluaran bertugas untuk membantu bendahara pengeluaran sebagai pembuat dokumen pengeluaran uang (Pembuat SPP LS, SPP Gaji, SPP GU/TU/UP dan menertibkan administrasi pembukuan keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 31 Mei 2019 dengan ketentuan segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tanjung Pati

Pada tanggal : 31 Mei 2019

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**Ir. H. ANHARMEN**

NIP. 19640102 199003 1 010

Tembusan kepada Yth :

1. Bpk Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan).
2. Sdr. Kepala Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
3. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Ketinggian.
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Alamat : Jl. Mr. Syafruddin Prawira Negara Km. 7 Tanjung Pati, Kec. Harau - Kode Pos 26271  
Telp ☎. (0752) 7754203 Faks 📠. (0752) 7750136  
E-Mail : dishub50kota@gmail.com, Website : [Http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/](http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR : 551/ 01 /KEP/DISHUB-LK/I/2019**

**TENTANG**

**PENEMPATAN PERSONIL DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**  
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota, dirasa perlu mengatur kembali penempatan personil pada sekretariat dan bidang-bidang;
  - b. bahwa personil yang tersebut pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing di sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3800 );
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 );
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pokok- Pokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Tatacara Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pelanggaran Negeri Sipil dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 64);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 145 );
14. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 397 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lima Puluh Kota Tahun 2019.

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Personil-personil Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana pada Lajur 2 dengan Penempatan pada Lajur 6 sebagaimana pada Lampiran yang merupakan kesatuan utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan diterbitkan Keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 551/359/KEP/DISHUB-LK/VII/2018 Tanggal 2 Juli 2018 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Kepada atasan langsung personil dimaksud Diktum Kesatu Keputusan, supaya menyusun uraian tugas masing-masing personil pada unit kerja yang bersangkutan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tanjung Pati  
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**Ir. H. ANHARMEN**  
NIP. 19640102 199003 1 010

Tembusan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota di - Sarilamak;
3. Sdr. Kepala Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
4. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Ketinggian;
6. Sdr. Sekretaris, Kepala Bidang, Kasi / Kasubag, dan Fungsional Umum di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
 NOMOR : 551/ 01 /KEP/DISHUB-LK/I/2019  
 TANGGAL : 02 JANUARI 2019  
 TENTANG : PENEMPATAN PERSONIL DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

No	Sekretariat / Bidang Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan	Bertugas Selaku	
				Lama	Baru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>SEKRETARIAT</b>					
1	Ir. H. Anharmen NIP. 19640102 199003 1 010	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	Kepala Dinas	Kepala Dinas
2	Aldasman S.Pd NIP. 19640720 198410 1 001	Pembina Tk.I (IV/b)	Sekretaris	Sekretaris	Sekretaris
3	Nurmi Yenti, S.Sos NIP. 19670402 199103 2 005	Penata Tk. I (III/d)	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4	Alwin Kusuma Eryana S.S.T (TD) NIP. 19930307 201612 1 001	Penata Muda (III/a)	Analisis Jabatan	Pengadministrasian Umum pada Subag Umum dan Kepegawaian	Analisis Jabatan pada Subag Umum dan Kepegawaian
5	Romaziko NIP. 19830807 201001 1 006	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Subag Umum dan Kepegawaian	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana pada Subag Umum dan Kepegawaian
6	Ismail Marzuki NIP. 19690501 201001 1 002	Juru (I/c)	Petugas Keamanan	Petugas Keamanan pada Subag Umum dan Kepegawaian	Petugas Keamanan pada Subag Umum dan Kepegawaian
7	Subril NIP. 19610425 201212 1 001	Juru Muda Tk.I (I/b)	Petugas Keamanan	Petugas Keamanan pada Subag Umum dan Kepegawaian	Petugas Keamanan pada Subag Umum dan Kepegawaian
8	Al Fajri, A.Md. LLAJ	Pengatur (II/c)	CPNS	-	CPNS
9	Afrizon, S.ST NIP. 19631018 198709 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
10	Yesi Yulita, S.Sos NIP. 19820724 200901 2 004	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	Pengelola Keuangan pada Subag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Subag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
11	Marta Aldila, S.Sos NIP. 19820801 200701 2 004	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Laporan Keuangan	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Subag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Analisis Laporan Keuangan pada Subag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
12	Pra Aidil NIP. 19770907 200801 1 004	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Anggaran	Petugas Teknologi Informasi Komputer pada Subag Umum dan Kepegawaian	Pengadministrasi Anggaran pada Subag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

No	Sekretariat / Bidang Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan	Bertugas Selaku	
				Lama	Baru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	Jevi Ade Chandra NIP. 19840405 201001 1 004	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Keuangan	Bendahara pada Subag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Pengadministrasi Keuangan pada Subag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
14	Bayu Esa Putra NIP. 19841017 201408 1 002	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengadministrasi Penerimaan	Bendahara pada Subag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Pengadministrasi Penerimaan pada Subag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
15	Tri Fadhi, A.Md. LLAJ	Pengatur (II/c)	CPNS	-	CPNS
<b>BIDANG PENGUJIAN SARANA DAN PRASARANA</b>					
16	Orlanda, ST, MT NIP. 19770605 200212 1 006	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Pengujian Sarana dan Prasarana	Kepala Bidang Pengujian Sarana dan Prasarana	Kepala Bidang Pengujian Sarana dan Prasarana
	-	-	Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-
17	Husni Ananda, S.Sos NIP. 19830923 200312 1 006	Penata (III/c)	Pengawas Pengujian Kendaraan Bermotor	Pengelola Pengujian Kendaraan pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Pengawas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
18	AR Edo Samara, S.S.T (TD) NIP. 19951008 201804 1 001	Penata Muda (III/a)	Penyusun Rencana Pengujian	Analisis Teknik survei Pemanduan Moda Transportasi Darat pada Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Penyusun Rencana Pengujian pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
19	Benny Eka Putra NIP. 19760329 200312 1 004	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengadministrasi Pengujian	Pengelola Pengujian Kendaraan pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Pengadministrasi Pengujian pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
20	Syawaladi NIP. 19760930 200701 1 002	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Pengujian	Pengelola pengujian Kendaraan pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Pengadministrasi Pengujian pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
21	Masrianto NIP. 19810324 201101 1 002	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Pengadministrasi Pengujian	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran pada Subag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Pengadministrasi Pengujian pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
22	Hari Wibowo, A.Ma.PKB NIP. 19890805 201612 1 001	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Pengadministrasi Pengujian	Pengelola pengujian Kendaraan pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Pengadministrasi Pengujian pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
23	Fazri Zani, A.Ma.PKB 19961011 201804 1 001	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Pengadministrasi Pengujian	Pengelola pengujian Kendaraan pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Pengadministrasi Pengujian pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
24	Rusdi, ST NIP. 19680213 200604 1 003	Penata (III/c)	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana

No	Sekretariat / Bidang Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan	Bertugas Selaku	
				Lama	Baru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25	Bunawarman, S.Sos NIP. 19790903 200701 1 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Kebutuhan Perlengkapan Jalan	Pengelola Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Jalan pada Seksi Sarana dan Prasarana	Analisis Kebutuhan Perlengkapan Jalan pada Seksi Sarana dan Prasarana
26	Muhammad Ali Akbar, S.Sos NIP. 19770701 200701 1 008	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengevaluasi Kinerja Prasarana LLAJ	Pengevaluasi Program dan Kinerja pada Subag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Pengevaluasi Kinerja Prasarana LLAJ pada Seksi Sarana dan Prasarana
27	Akhyar, SE, MM NIP. 19690826 199312 1 002	Pembina (IV/a)	Kepala Seksi Pembinaan Usaha dan Perbengkelan	Kepala Seksi Pembinaan Usaha dan Perbengkelan	Kepala Seksi Pembinaan Usaha dan Perbengkelan
28	Riko Saputra NIP. 19820923 201001 1 004	Pengatur (II/c)	Pranata Teknologi Informasi Komputer	Pengelola Perbengkelan dan Pengujian Kendaraan Bermotor pada Seksi Pembinaan Usaha dan Perbengkelan	Pranata Teknologi Informasi Komputer pada Seksi Pembinaan Usaha dan Perbengkelan
<b>BIDANG LALU LINTAS</b>					
29	Erizal, S.ST NIP. 19651108 198603 1 010	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Lalu Lintas	Kepala Bidang Lalu Lintas	Kepala Bidang Lalu Lintas
30	Ifnaldi NIP. 19650208 198503 1 005	Penata (III/c)	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
31	Wilman NIP. 19680225 201001 1 001	Pengatur (II/c)	Pengadmistrasi LLAJ	Pengadministrasi LLAJ pada Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pengadministrasi LLAJ pada Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
	-	-	Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban	-	-
32	Beni Andriko NIP. 19830518 201001 1 005	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Kecelakaan LLAJ	Pranata Standar Keselamatan pada Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban	Pengadministrasi Kecelakaan LLAJ pada Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban
33	Dadang Eri Putra, S.SiT NIP. 19821022 200312 1 004	Penata (III/c)	Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional	Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional	Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional
34	Boy Chandra, S.Sos NIP. 19740226 200701 1 006	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengawas Lalu Lintas Darat	Teknisi Survey Jaringan Prasarana dan Pelayanan Transportasi Jalan pada Seksi Sarana dan Prasarana	Pengawas Lalu Lintas Darat pada Seksi Pengendalian dan Operasional
35	Adrizal NIP. 19711010 201408 1 003	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengemudi	Pengelola Pengawas LLAJ pada Seksi Pengendalian dan Operasional	Pengemudi pada Seksi Pengendalian dan Operasional

No	Sekretariat / Bidang Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan	Bertugas Selaku	
				Lama	Baru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
36	Ardi NIP. 19660523 200701 1 004	Pengatur Muda (II/a)	Pengemudi	Pengelola Pengawas LLAJ pada Seksi Pengendalian dan Operasional	Pengemudi pada Seksi Pengendalian dan Operasional
37	Nofriyan Emril, A.Md. LLAJ	Pengatur (II/c)	CPNS	-	CPNS
<b>BIDANG ANGKUTAN</b>					
38	Irwandi, SH NIP. 19620822 198603 1 005	Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Bidang Angkutan	Kepala Bidang Angkutan	Kepala Bidang Angkutan
39	Muhammad Rehatta, SH NIP. 19760323 200312 1 007	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Angkutan Orang	Kepala Seksi Angkutan Orang	Kepala Seksi Angkutan Orang
40	Mawirzon NIP. 19660820 200604 1 003	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Perizinan	Pemeriksa Lalu Lintas Darat pada Seksi Angkutan Orang	Pengadministrasi Perizinan pada Seksi Angkutan Orang
	-	-	Kepala Seksi Angkutan Barang dan Khusus	-	-
41	Mukni NIP. 19621120 198503 1 006	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Terminal dan Parkir	Kepala Seksi Terminal dan Parkir	Kepala Seksi Terminal dan Parkir
42	Rudi, S.Sos NIP. 19740109 200701 1 005	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengawas Angkutan dan Terminal	Petugas Teknologi Informasi Komputer pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Pengawas Angkutan dan Terminal pada Kepala Seksi Terminal dan Parkir
43	Yulizar NIP. 19610704 198603 1 006	Penata Muda (III/a)	Operator Terminal	Pengawas Terminal pada Seksi Terminal dan Parkir	Operator Terminal pada Seksi Terminal dan Parkir
44	Romy NIP. 19770924 200701 1 002	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Karcis	Pemeliharaan Kendaraan pada Seksi Pembinaan Usaha dan Perbengkelan	Pengadministrasi Karcis pada Seksi Terminal dan Parkir

Ditetapkan di : Tanjung Pati  
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**Ir. H. ANHARMEN**  
NIP. 19640102 199003 1 010



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Alamat : Jl. Mr. Syafruddin Prawira Negara Km. 7 Tanjung Pati, Kec. Harau - Kode Pos 26271  
Telp ☎. (0752) 7754203 Faks 📠. (0752) 7750136  
E-Mail : dishub50kota@gmail.com, Website : [Http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/](http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR : 551/311/KEP/DISHUB-LK/II/2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PENEMPATAN PERSONIL NOMOR : 551/01/KEP/DISHUB-LK/I/2019**  
**TANGGAL 02 JANUARI 2019 DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota, dirasa perlu mengatur kembali penempatan personil pada sekretariat dan bidang-bidang;
  - b. bahwa personil yang tersebut pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing di sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3800 );
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 );
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pokok- Pokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Tatacara Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pelanggaran Negeri Sipil dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 64);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 145 );
14. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 397 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lima Puluh Kota Tahun 2019.

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Personil-personil Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana pada Lajur 2 dengan Penempatan pada Lajur 6 sebagaimana pada Lampiran yang merupakan kesatuan utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan diterbitkan Keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 551/01/KEP/DISHUB-LK/I/2019 Tanggal 2 Januari 2019 dinyatakan tidak berlaku lagi.

- KETIGA : Kepada atasan langsung personil dimaksud Diktum Kesatu Keputusan, supaya menyusun uraian tugas masing-masing personil pada unit kerja yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 8 Februari 2019 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tanjung Pati  
Pada Tanggal : 08 Februari 2019  
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**Ir. H. ANHARMEN**  
NIP. 19640102 199003 1 010

Tembusan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota di - Sarilamak;
3. Sdr. Kepala Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
4. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Ketinggian;
6. Sdr. Sekretaris, Kepala Bidang, Kasi / Kasubag, dan Fungsional Umum di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
 NOMOR : 551/311/KEP/DISHUB-LK/II/2019  
 TANGGAL : 08 FEBRUARI 2019  
 TENTANG : PERUBAHAN PERTAMA PENEMPATAN PERSONIL NOMOR : 551/01/KEP/DISHUB-LK/I/2019 TANGGAL 02 JANUARI 2019 DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

No	Sekretariat / Bidang Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan	Bertugas Selaku	
				Lama	Baru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>SEKRETARIAT</b>					
1	Ir. H. Anharmen NIP. 19640102 199003 1 010	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	Kepala Dinas	Kepala Dinas
2	Aldasman S.Pd NIP. 19640720 198410 1 001	Pembina Tk.I (IV/b)	Sekretaris	Sekretaris	Sekretaris
3	Nurmi Yenti, S.Sos NIP. 19670402 199103 2 005	Penata Tk. I (III/d)	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4	Alwin Kusuma Eryana S.S.T (TD) NIP. 19930307 201612 1 001	Penata Muda (III/a)	Perancang Sistem Informasi Kepegawaian	Analisis Jabatan pada Subag Umum dan Kepegawaian	Perancang Sistem Informasi Kepegawaian pada Subag Umum dan Kepegawaian
5	Romaziko NIP. 19830807 201001 1 006	Pengatur (II/c)	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana pada Subag Umum dan Kepegawaian	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Subag Umum dan Kepegawaian
6	Alfin Kholis, A.Md.LLAJ NIP. 19970318 201902 1 001	Pengatur (II/c)	Pengelola Kepegawaian	-	Pengelola Kepegawaian pada Subag Umum dan Kepegawaian
7	Ismail Marzuki NIP. 19690501 201001 1 002	Juru (I/c)	Petugas Keamanan	Petugas Keamanan pada Subag Umum dan Kepegawaian	Petugas Keamanan pada Subag Umum dan Kepegawaian
8	Subril NIP. 19610425 201212 1 001	Juru Muda Tk.I (I/b)	Petugas Keamanan	Petugas Keamanan pada Subag Umum dan Kepegawaian	Petugas Keamanan pada Subag Umum dan Kepegawaian
9	Afrizon, S.ST NIP. 19631018 198709 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Kasubag Perencanaan,Keuangan dan Pelaporan	Kasubag Perencanaan,Keuangan dan Pelaporan	Kasubag Perencanaan,Keuangan dan Pelaporan
10	Yesi Yulita, S.Sos NIP. 19820724 200901 2 004	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Subag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Subag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
11	Marta Aldila, S.Sos NIP. 19820801 200701 2 004	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Laporan Keuangan	Analisis Laporan Keuangan pada Subag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Analisis Laporan Keuangan pada Subag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
12	Pra Aidil NIP. 19770907 200801 1 004	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Anggaran	Pengadministrasi Anggaran pada Subag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Pengadministrasi Anggaran pada Subag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
13	Jevi Ade Chandra NIP. 19840405 201001 1 004	Pengatur (II/c)	Bendahara	Pengadministrasi Keuangan pada Subag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Bendahara pada Subag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

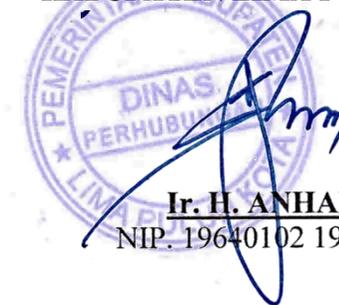
No	Sekretariat / Bidang Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan	Bertugas Selaku	
				Lama	Baru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Bayu Esa Putra NIP. 19841017 201408 1 002	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Bendahara	Pengadministrasi Penerimaan pada Subag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Bendahara pada Subag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
<b>BIDANG PENGUJIAN SARANA DAN PRASARANA</b>					
15	Orlanda, ST, MT NIP. 19770605 200212 1 006	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Pengujian Sarana dan Prasarana	Kepala Bidang Pengujian Sarana dan Prasarana	Kepala Bidang Pengujian Sarana dan Prasarana
	-	-	Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-
16	Husni Ananda, S.Sos NIP. 19830923 200312 1 006	Penata (III/c)	Pengawas Pengujian Kendaraan Bermotor	Pengawas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Pengawas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
17	AR Edo Samara, S.S.T (TD) NIP. 19951008 201804 1 001	Penata Muda (III/a)	Penyusun Rencana Pengujian	Penyusun Rencana Pengujian pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Penyusun Rencana Pengujian pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
18	Benny Eka Putra NIP. 19760329 200312 1 004	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengadministrasi Pengujian	Pengadministrasi Pengujian pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Pengadministrasi Pengujian pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
19	Syawaldi NIP. 19760930 200701 1 002	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Pengujian	Pengadministrasi Pengujian pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Pengadministrasi Pengujian pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
20	Masrianto NIP. 19810324 201101 1 002	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Pengadministrasi Pengujian	Pengadministrasi Pengujian pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Pengadministrasi Pengujian pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
21	Hari Wibowo, A.Ma.PKB NIP. 19890805 201612 1 001	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Pengadministrasi Pengujian	Pengadministrasi Pengujian pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Pengadministrasi Pengujian pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
22	Fazri Zani, A.Ma.PKB NIP. 19961011 201804 1 001	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Pengadministrasi Pengujian	Pengadministrasi Pengujian pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Pengadministrasi Pengujian pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
23	Rusdi, ST NIP. 19680213 200604 1 003	Penata (III/c)	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
24	Bunawarman, S.Sos NIP. 19790903 200701 1 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Kebutuhan Perlengkapan Jalan	Analisis Kebutuhan Perlengkapan Jalan pada Seksi Sarana dan Prasarana	Analisis Kebutuhan Perlengkapan Jalan pada Seksi Sarana dan Prasarana
25	Nofriyan Emril, A.Md.LLAJ NIP.19961112 201902 1 001	Pengatur (II/c)	Teknisi Survey Jaringan Prasarana dan Pelayanan Transportasi Jalan	-	Teknisi Survey Jaringan Prasarana dan Pelayanan Transportasi Jalan pada Seksi Sarana dan Prasarana
26	Akhyar, SE, MM NIP. 19690826 199312 1 002	Pembina (IV/a)	Kepala Seksi Pembinaan Usaha dan Perbengkelan	Kepala Seksi Pembinaan Usaha dan Perbengkelan	Kepala Seksi Pembinaan Usaha dan Perbengkelan
27	Muhammad Ali Akbar, S.Sos NIP. 19770701 200701 1 008	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengamat Teknik	Pengevaluasi Kinerja Prasarana LLAJ pada Seksi Sarana dan Prasarana	Pengamat Teknik pada Seksi Pembinaan Usaha dan Perbengkelan
28	Riko Saputra NIP. 19820923 201001 1 004	Pengatur (II/c)	Pranata Teknologi Informasi Komputer	Pranata Teknologi Informasi Komputer pada Seksi Pembinaan Usaha dan Perbengkelan	Pranata Teknologi Informasi Komputer pada Seksi Pembinaan Usaha dan Perbengkelan

No	Sekretariat / Bidang Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan	Bertugas Selaku	
				Lama	Baru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>BIDANG LALU LINTAS</b>					
29	Erizal, S.ST NIP. 19651108 198603 1 010	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Lalu Lintas	Kepala Bidang Lalu Lintas	Kepala Bidang Lalu Lintas
30	Ifnaldi NIP. 19650208 198503 1 005	Penata (III/c)	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
31	Wilman NIP. 19680225 201001 1 001	Pengatur (II/c)	Pengadmistrasi LLAJ	Pengadministrasi LLAJ pada Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pengadministrasi LLAJ pada Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
32	Behernard, A.Md. LLAJ NIP. 19910503 201902 1 001	Pengatur (II/c)	Pengelola Rekayasa Lalu Lintas	-	Pengelola Rekayasa Lalu Lintas pada Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
	-	-	Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban	-	-
33	Beni Andriko NIP. 19830518 201001 1 005	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Kecelakaan LLAJ	Pranata Standar Keselamatan pada Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban	Pengadministrasi Kecelakaan LLAJ pada Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban
34	Dadang Eri Putra, S.SiT NIP. 19821022 200312 1 004	Penata (III/c)	Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional	Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional	Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional
35	Boy Chandra, S.Sos NIP. 19740226 200701 1 006	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengawas Lalu Lintas Darat	Teknisi Survey Jaringan Prasarana dan Pelayanan Transportasi Jalan pada Seksi Sarana dan Prasarana	Pengawas Lalu Lintas Darat pada Seksi Pengendalian dan Operasional
36	Alfajri, A.Md. LLAJ NIP. 19970911 201902 1 001	Pengatur (II/c)	Pengelola Pengawasan LLAJ	-	engelola Pengawas LLAJ pada Seksi Pengendalian dan Operasional
37	Adrizal NIP. 19711010 201408 1 003	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pemeliharaan Kendaraan	Pengemudi pada Seksi Pengendalian dan Operasional	Pemeliharaan Kendaraan pada Seksi Pengendalian dan Operasional
38	Ardi NIP. 19660523 200701 1 004	Pengatur Muda (II/a)	Pengemudi	Pengemudi pada Seksi Pengendalian dan Operasional	Pengemudi pada Seksi Pengendalian dan Operasional
<b>BIDANG ANGKUTAN</b>					
39	Irwandi, SH NIP. 19620822 198603 1 005	Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Bidang Angkutan	Kepala Bidang Angkutan	Kepala Bidang Angkutan
40	Muhammad Rehatta, SH NIP. 19760323 200312 1 007	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Angkutan Orang	Kepala Seksi Angkutan Orang	Kepala Seksi Angkutan Orang
41	Mawirzon NIP. 19660820 200604 1 003	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Perizinan	Pengadministrasi Perizinan pada Seksi Angkutan Orang	Pengadministrasi Perizinan pada Seksi Angkutan Orang
42	Tri Fadhli, A.Md.LLAJ NIP.19930303 201902 1 001	Pengatur (II/c)	Teknisi Survey Jaringan Transportasi	-	Teknisi Survey Jaringan Transportasi pada Seksi Angkutan Orang

No	Sekretariat / Bidang Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan	Bertugas Selaku	
				Lama	Baru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	-	-	Kepala Seksi Angkutan Barang dan Khusus	-	-
43	Romy NIP. 19770924 200701 1 002	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Pelaporan dan Penyusunan Tarif Transportasi	Pengadministrasi Karcis pada Seksi Terminal dan Parkir	Pengadministrasi Pelaporan dan Penyusunan Tarif Transportasi pada Seksi Angkutan Barang dan Khusus
44	Mukni NIP. 19621120 198503 1 006	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Terminal dan Parkir	Kepala Seksi Terminal dan Parkir	Kepala Seksi Terminal dan Parkir
45	Rudi, S.Sos NIP. 19740109 200701 1 005	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengawas Angkutan dan Terminal	Pengawas Angkutan dan Terminal pada Kepala Seksi Terminal dan Parkir	Pengawas Angkutan dan Terminal pada Kepala Seksi Terminal dan Parkir
46	Yulizar NIP. 19610704 198603 1 006	Penata Muda (III/a)	Operator Terminal	Operator Terminal pada Seksi Terminal dan Parkir	Operator Terminal pada Seksi Terminal dan Parkir

Ditetapkan di : Tanjung Pati  
Pada Tanggal : 08 Februari 2019

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**Ir. H. ANHARMEN**  
NIP. 19640102 199003 1 010



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA  
DINAS PERHUBUNGAN**

Alamat : Jl. Mr. Syafruddin Prawira Negara Km. 7 Tanjung Pati, Kec. Harau - Kode Pos 26271  
Telp ☎. (0752) 7754203 Faks 📠. (0752) 7750136  
E-Mail : dishub50kota@gmail.com, Website : [Http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/](http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR : 551/07/KEP/DISHUB-LK/I/2019**

**TENTANG**

**PENEMPATAN TENAGA HARIAN LEPAS (THL) DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan Dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota, dirasa perlu mengatur kembali penempatan Tenaga Harian Lepas (THL) pada Sekretariat dan Bidang-bidang;
  - b. bahwa personil yang tersebut pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing di Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3800 );
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 );
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pokok- Pokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Tatacara Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pelanggaran Negeri Sipil dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 64);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 145 );
14. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 397 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan :

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lima Puluh Kota Tahun 2019.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menetapkan Tenaga Harian Lepas (THL) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana pada Lajur 2 dengan Penempatan pada Lajur 6 sebagaimana pada Lampiran yang merupakan kesatuan utuh dengan keputusan ini.

**KEDUA** : Kepada atasan langsung personil dimaksud Diktum Kesatu Keputusan, supaya menyusun uraian tugas masing-masing personil pada unit kerja yang bersangkutan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tanjung Pati  
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**Ir. H. ANHARMEN**

NIP. 19640102 199003 1 010

Tembusan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota di - Sarilamak;
3. Sdr. Kepala Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
4. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Ketinggian;
6. Sdr. Sekretaris, Kepala Bidang, Kasi / Kasubag, dan Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
 NOMOR : 551/07 /KEP/DISHUB-LK/I/2019  
 TANGGAL : 02 JANUARI 2019  
 TENTANG : PENEMPATAN TENAGA HARIAN LEPAS (THL)  
 DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

No	Sekretariat / Bidang Nama	Jabatan	Bertugas Selaku	
			Lama	Baru
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
<b>SEKRETARIAT</b>				
1	Ali Muklas	Administrasi Umum	Administrasi Umum pada Subag Umum dan Kepegawaian	Administrasi Umum pada Subag Umum dan Kepegawaian
2	Ristia Juniarsih, SP	Administrasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian pada Subag Umum dan Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian pada Subag Umum dan Kepegawaian
3	Intan Chaniago	Petugas Agenda	Agenda dan pengarsipan pada Subag Umum dan Kepegawaian	Petugas Agenda pada Subag Umum dan Kepegawaian
4	Welni Susianti	Pengelola Aset	Pengelola Aset pada Subag Umum dan Kepegawaian	Pengelola Aset pada Subag Umum dan Kepegawaian
5	Aulia Gusti Nanda	Sopir Kepala Dinas	Sopir Kepala Dinas pada Subag Umum dan Kepegawaian	Sopir Kepala Dinas pada Subag Umum dan Kepegawaian
6	Toton Ariadi	Navigator	Navigator pada Subag Umum dan Kepegawaian	Navigator pada Subag Umum dan Kepegawaian
7	Febria Meldi	Sopir Bus	Sopir Bus pada Subag Umum dan Kepegawaian	Sopir Bus pada Subag Umum dan Kepegawaian
8	Sekar Hamdani Putro	Sopir Bus	Sopir Bus pada Subag Umum dan Kepegawaian	Sopir Bus pada Subag Umum dan Kepegawaian
9	Okta Efianto	Petugas Caraka	Petugas Caraka pada Subag Umum dan Kepegawaian	Petugas Caraka pada Subag Umum dan Kepegawaian
10	Differi, R	Petugas Kebersihan	Petugas Kebersihan pada Subag Umum dan Kepegawaian	Petugas Kebersihan pada Subag Umum dan Kepegawaian

No	Sekretariat / Bidang Nama	Jabatan	Bertugas Selaku	
			Lama	Baru
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
11	Windu Islami, A. Md	Petugas Kebersihan	Operator Komputer pada Subag Umum dan Kepegawaian	Petugas Kebersihan pada Subag Umum dan Kepegawaian
12	Fahmil Wardi	Keamanan Kantor	Keamanan Kantor pada Subag Umum dan Kepegawaian	Keamanan Kantor pada Subag Umum dan Kepegawaian
13	Eko Satria Putra	Keamanan Kantor	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	Keamanan Kantor pada Subag Umum dan Kepegawaian
14	Gelsia Oktaviona	Petugas Pengarsipan	Administrasi Angkutan Orang pada Seksi Angkutan Orang	Petugas Pengarsipan pada Subag Umum dan Kepegawaian
15	Sandra Harmen, S.Pd	Operator Komputer	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	Operator Komputer pada Subag Umum dan Kepegawaian
16	Fitri, SE	Administrasi Keuangan	Administrasi Keuangan pada Subag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Administrasi Keuangan pada Subag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
17	Hidayatul Fitri, ST	Administrasi Pelaporan	Administrasi Pelaporan pada Subag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Administrasi Pelaporan pada Subag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
18	Shinta Bella, SE	Petugas Pengevaluasi Program dan Kinerja	Petugas Pengevaluasi Program dan Kinerja pada Subag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Petugas Pengevaluasi Program dan Kinerja pada Subag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
19	Rika Melia	Pelaksanaan Program/Anggaran	Pelaksanaan Program/Anggaran pada Subag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Pelaksanaan Program/Anggaran pada Subag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
20	Aulia Febricca.MS, P.Si	Operator Komputer	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	Operator Komputer pada Subag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
<b>BIDANG PENGUJIAN SARANA DAN PRASARANA</b>				
21	Cici Avivi	Administrasi PKB	Administrasi PKB pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Administrasi PKB pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
22	Kemal Arif Ismail	Petugas Ketok Plat Uji	Pemasangan Uji dan Cat Samping pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Petugas Ketok Plat Uji pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
23	Novel Shandita Patria, S.Pd	Operator Komputer	Operator PJU pada Seksi Sarana dan Prasarana	Operator Komputer pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor

No	Sekretariat / Bidang Nama	Jabatan	Bertugas Selaku	
			Lama	Baru
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
24	Iwan Sandi	Operator Warning Light	Operator Warning Light pada Seksi Sarana dan Prasarana	Operator Warning Light pada Seksi Sarana dan Prasarana
25	Silvia Erwandi, S.Sos	Operator Komputer	Administrasi PKB pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Operator Komputer pada Seksi Sarana dan Prasarana
26	Leo Fernando	Operator PJU	Operator PJU pada Seksi Sarana dan Prasarana	Operator PJU pada Seksi Sarana dan Prasarana
27	M.Rafki, A.Md	Operator PJU	Operator PJU pada Seksi Sarana dan Prasarana	Operator PJU pada Seksi Sarana dan Prasarana
28	Ahmad Heru Septiadi	Operator PJU	Operator PJU pada Seksi Sarana dan Prasarana	Operator PJU pada Seksi Sarana dan Prasarana
29	Nato Putra	Operator PJU	Administrasi Parkir pada Seksi Terminal dan Parkir	Operator PJU pada Seksi Sarana dan Prasarana
30	Rike Nofrianda	Operator PJU	Operator PJU pada Seksi Sarana dan Prasarana	Operator PJU pada Seksi Sarana dan Prasarana
<b>BIDANG LALU LINTAS</b>				
31	Anggi Ifdillah	Operator Komputer	Operator Komputer pada Seksi Pengendalian dan Operasional	Operator Komputer pada Seksi Pengendalian dan Operasional
32	Siska Mayang Sari,SE	Operator Komputer	Operator Komputer pada Seksi Pengendalian dan Operasional	Operator Komputer pada Seksi Pengendalian dan Operasional
33	Aini Putri	Pengadministrasi LLAJ	Pengadministrasi LLAJ pada Seksi Pengendalian dan Operasional	Pengadministrasi LLAJ pada Seksi Pengendalian dan Operasional
34	Rahman Hakim	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
35	Masmulyadi	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional

No	Sekretariat / Bidang Nama	Jabatan	Bertugas Selaku	
			Lama	Baru
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
36	Aswandi	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
37	Hendri	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
38	Edi Yanto	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
39	Anda Kurniadi	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
40	Hendra	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
41	Sri Gandhi Sudana	PAM Lalu Lintas	Petugas Ketok Plat Uji pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
42	Dasril	PAM Lalu Lintas	Petugas PAM Pasar pada Seksi Terminal dan Parkir	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
43	Fatma Yosi Putri	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
44	Febrianda	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
45	Divo Afdarul Adha, A.md	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
46	Agus Afriadi	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
47	Mairirin Fitri	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
48	Yondra	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
49	Aisyah	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
50	Indah Permata Sari	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional

No	Sekretariat / Bidang Nama	Jabatan	Bertugas Selaku	
			Lama	Baru
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
51	Yohana Vigrina	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
52	Romi Saputra	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
53	Jefri Yanto	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
54	Beni Mayendra	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
55	Anton Prima Candra	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
56	Syofri Yomi	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
57	M. Tarmi Hin	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
58	Muh. Zachri	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
59	Eko Yunedi Putra,S.Pd	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
60	Fuji Okta Adryantama	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
61	Dianda Putra	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
62	Rilda Saputra	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
63	Riki Fernando	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
64	Oga Saputra	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
65	Debi Novaldi	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional

No	Sekretariat / Bidang Nama	Jabatan	Bertugas Selaku	
			Lama	Baru
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
66	Azmul Afif, A.md	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
67	Diego Prima , S.Pd	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
68	Rian Kurnia, SH	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
69	Widya Ningsih	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
70	Hendri	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
71	Wahyu Utama Patra	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
72	Rena Rahayu, A.md	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
73	Riyand Pratama, A.md	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
74	Rully Jasrul	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
75	Abdul Hadi, A.md	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
76	Ranggi Irawan	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
77	Rian Pratama Putra, S.ip	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
78	Rizmanullah Azizi	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
79	Wido Dwi Putra	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional

No	Sekretariat / Bidang Nama	Jabatan	Bertugas Selaku	
			Lama	Baru
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
80	Igo Setiawan	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
81	Kurniawan Eka Putra	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
82	Wildeni	PAM Lalu Lintas	Petugas PAM Pasar pada Seksi Terminal dan Parkir	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
83	Belly Sofyan	PAM Lalu Lintas	Petugas PAM Pasar pada Seksi Terminal dan Parkir	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
84	Willa Maulina Putri	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
85	Vebby Gusma	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
86	Rio Fahyondra	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
87	Harju Riga Arta	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
88	Ade Putra Zulkarnain	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
89	Alfi Yonandia Safrima	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
90	Tri Afrilia Putri	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
91	Rafi Candra, SH	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
92	Novita Sari	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
93	Davidol Nandes	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
94	Rusman Adri	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional

No	Sekretariat / Bidang Nama	Jabatan	Bertugas Selaku	
			Lama	Baru
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
95	Fajri.H	PAM Lalu Lintas	Keamanan Kantor pada Subag Umum dan Kepegawaian	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
96	Rahma Yani, S.Pd	PAM Lalu Lintas	Administrasi Penerimaan pada Subag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
97	Dahnil Sukri	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
98	Putri Lesmana Sari	PAM Lalu Lintas	Operator Komputer pada Subag Umum dan Kepegawaian	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
99	Syaiful Darmis	PAM Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
100	Fitri Susanti	PAM Lalu Lintas	Petugas Kebersihan pada Subag Umum dan Kepegawaian	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional
<b>BIDANG ANGKUTAN</b>				
101	Nanang Agustivianus	Petugas TPR	Petugas TPR pada Seksi Terminal dan Parkir	Petugas TPR pada Seksi Terminal dan Parkir
102	Donny Putra	Petugas TPR	Petugas TPR pada Seksi Terminal dan Parkir	Petugas TPR pada Seksi Terminal dan Parkir
103	Antoni Maskepen	Petugas TPR	Petugas TPR pada Seksi Terminal dan Parkir	Petugas TPR pada Seksi Terminal dan Parkir
104	Mulyadi	Petugas TPR	Petugas TPR pada Seksi Terminal dan Parkir	Petugas TPR pada Seksi Terminal dan Parkir
105	Zikri Fuadi	Petugas PAM Pasar	Petugas PAM Pasar pada Seksi Terminal dan Parkir	Petugas PAM Pasar pada Seksi Terminal dan Parkir
106	Yusma Yanti, S.Pd	Administrasi Angkutan Barang	Administrasi Angkutan Barang pada Seksi Angkutan Orang	Administrasi Angkutan Barang pada Seksi Angkutan Orang
107	Yuni Fitria Sarah	Administrasi Terminal dan Parkir	Administrasi Terminal pada Seksi Terminal dan Parkir	Administrasi Terminal dan Parkir pada Seksi Terminal dan Parkir
108	Anggola Marpauh	Petugas PAM Pasar	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	Petugas PAM Pasar pada Seksi Terminal dan Parkir

No	Sekretariat / Bidang Nama	Jabatan	Bertugas Selaku	
			Lama	Baru
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
109	Rio Adi Candra	Petugas PAM Pasar	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	Petugas PAM Pasar pada Seksi Terminal dan Parkir
110	M. Afdol	Petugas PAM Pasar	PAM Lalu Lintas pada Seksi Pengendalian dan Operasional	Petugas PAM Pasar pada Seksi Terminal dan Parkir
111	Gemala Harisa	Administrasi Angkutan Orang	Administrasi PKB pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Administrasi Angkutan Orang pada Seksi Angkutan Orang
112	Nurwahyuni Andasari,SE	Operator Komputer	Operator Komputer pada Seksi Terminal dan Parkir	Operator Komputer pada Seksi Terminal dan Parkir

Ditetapkan di : Tanjung Pati  
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**Ir. H. ANHARMEN**  
NIP. 19640102 199003 1 010



## PEMERINTAH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Mr. Syafruddin Prawira Negara Km. 7 Tanjung Pati, Kec. Harau - Kode Pos 26271  
Telp ☎. (0752) 7754203 Faks ☎. (0752) 7750136  
E-Mail : dishub50kota@gmail.com, Website : [Http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/](http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 551/ 06 /KEP/DISHUB-LK/I/2019

#### TENTANG

### PENUNJUKKAN PENANGGUNG JAWAB DAN PEMAKAI KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang** :
- bahwa dengan terjadinya mutasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota, maka perlu diatur pemakai dan penanggung jawab kendaraan dinas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota, penunjukan penanggung jawab dan pemakai kendaraan dinas ditetapkan berdasarkan beban tugas;
  - bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  - Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 ( Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2018 Nomor 10);

8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 145 );
9. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 397 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019.

**Memperhatikan :** Persetujuan DPA OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019.

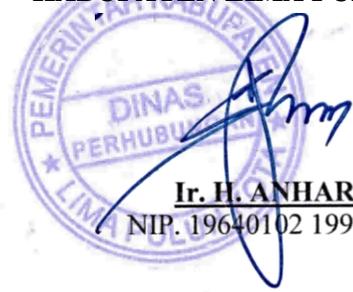
#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk penanggung jawab dan pemakai kendaraan dinas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pada saat jam kerja atau dalam keadaan tertentu, kendaraan dinas tersebut dapat digunakan oleh staf Dinas Perhubungan lainnya untuk kelancaran tugas dan kepentingan dinas.
- KETIGA** : Penanggung jawab dan pemakai kendaraan dinas tersebut harus memperhatikan dan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Bagi personil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dan pemakai kendaraan dinas tidak mutlak menguasai kendaraan tersebut, sewaktu-waktu dapat ditarik dan dipergunakan untuk kepentingan dinas lainnya;
  2. Kendaraan tersebut setiap harinya harus berada di lingkungan Instansi masing-masing kecuali jika sedang dipergunakan untuk kepentingan dinas ke luar daerah;
  3. Kerusakan kendaraan dan pembayaran pajak ditanggung oleh pemakai jika biaya pemeliharaan dari dinas tidak tersedia;
  4. Apabila si pemakai dialih tugaskan ke tempat lain, kendaraan dinas tersebut harus diserahkan kembali kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota atau karena pertimbangan tertentu kendaraan dapat ditarik oleh Kepala Dinas tanpa menuntut biaya yang telah dikeluarkan oleh pemakai;
  5. Apabila ada pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, kendaraan dinas tersebut sewaktu-waktu bisa ditarik dari pemakai dan kepadanya akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
  6. Bagi personil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dan pemakai kendaraan Dinas berkewajiban untuk membayar retribusi parkir dan retribusi pemakaian kekayaan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Kendaraan dinas beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) *seminggu dalam setahun* harus diserahkan kepada Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan pemeliharaan;
- KELIMA** : Dengan diterbitkannya keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 551/ 05 /KEP/DISHUB-LK/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 yang mengatur tentang hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Tanjung Pati  
Pada tanggal : 02 Januari 2019

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**Ir. H. ANHARMEN**  
NIP. 19640102 199003 1 010

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 551/ 06 /KEP/DISHUB-LK/I/2019

TANGGAL : 02 JANUARI 2019

TENTANG : PENUNJUKKAN PENANGGUNG JAWAB DAN PEMAKAI KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	Nama Pemakai/ NIP	Jabatan/Penanggung Jawab	Jenis>Nama Kendaraan	Merek/Type	Tahun Pembelian	Nomor Polisi	Kepemilikan	Ket.
1	Ir. H. Anharmen NIP. 19640102 199003 1 010	Kepala Dinas	Mobil/Roda 4	Suzuki Grand Vitara	2014	BA 29 C	Milik Pemerintah	
2	Aldasman, S.Pd NIP.19640720 198410 1 001	Sekretaris	Mobil/Roda 4	Suzuki Grand Vitara	2009	BA 1935 C	Milik Pemerintah	
3	Orlanda, ST. M.T NIP. 19770605 200212 1 006	Kabid PSP	Mobil/Roda 4	Hilux	2007	BA 9998 C	Milik Pemerintah	
4	Irwandi, SH NIP. 19620822 198603 1 005	Kabid Angkutan	Mobil/Roda 4	Kijang LGX	2003	BA 1920 C	Milik Pemerintah	
5	Erizal, S.ST NIP.19651108 198603 1 003	Kabid Lalin	Mobil/Roda 4	Kijang LGX	2003	BA 1983 C	Milik Pemerintah	
6	Nurmi Yenti, S.Sos NIP.19670402 199103 2 005	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sepeda Motor / Roda 2	Honda New Supra X 125 CW	2013	BA 3842 C	Milik Pemerintah	
7	Afrizon, S.ST NIP.19631018 198709 1 001	Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan	Sepeda Motor / Roda 2	Honda Verza 150 CW	2014	BA 4122 C	Milik Pemerintah	
8	Jevi Ade Candra NIP.19840405 201001 1 004	Pengadministrasi Keuangan	Sepeda Motor / Roda 2	Honda Supra	2011	BA 3730 C	Milik Pemerintah	
9	Akhyar, SE. MM NIP.19690826 199312 1 002	Kasi Pembinaan Usaha dan Perbengkelan	Sepeda Motor / Roda 2	Honda New Supra X 125 CW	2013	BA 3841 C	Milik Pemerintah	
10	Dadang Eri Putra, S. SiT NIP.19821022 200312 1 004	Kasi Pengendalian dan Operasional	Sepeda Motor / Roda 2	Honda Verza 150 CW	2013	BA 3910 C	Milik Pemerintah	
11	Mukni NIP.19621120 198503 1 006	Kasi Terminal dan Parkir	Sepeda Motor / Roda 2	Honda Supra	2011	BA 5013 C	Milik Pemerintah	

NO	Nama Pemakai/ NIP	Jabatan/Penanggung Jawab	Jenis>Nama Kendaraan	Merek/Type	Tahun Pembelian	Nomor Polisi	Kepemilikan	Ket.
12	Rusdi, ST NIP. 19680213 200604 1 003	Kasi Sarana dan Prasarana	Sepeda Motor / Roda 2	Honda New Supra X 125 CW	2013	BA 3909 C	Milik Pemerintah	
13	Yulizar NIP. 19610704 198603 1 006	Operator Terminal	Sepeda Motor / Roda 2	Honda Win	1992	BA 6880 CF	Milik Pemerintah	
14	Dinas Perhubungan	-	Sepeda Motor / Roda 2	Astrea C 100 ML Legenda	2002	BA 6901 CF	Milik Pemerintah	Pool
15	Dinas Perhubungan	-	Mobil / Roda 4	Mitsubishi Colt T 120 SS	1997	BA 1904 C	Milik Pemerintah	Pool
16	Dinas Perhubungan	-	Mobil/Roda 4	Kijang Grand	1994	BA 1909 C	Milik Pemerintah	Pool
17	Dinas Perhubungan	-	Mobil/Roda 4	Hisuzu B-Max	2017	BA 8831 C	Milik Pemerintah	Pool

Ditetapkan di : Tanjung Pati  
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**Ir. H. ANHARMEN**  
NIP. 19640102 199003 1 010



## PEMERINTAH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Mr. Syafruddin Prawira Negara Km. 7 Tanjung Pati, Kec. Harau - Kode Pos 26271  
Telp ☎. (0752) 7754203 Faks ☎. (0752) 7750136  
E-Mail : dishub50kota@gmail.com, Website : [Http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/](http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 551/ 371 /KEP/DISHUB-LK/VIII/2019

#### TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PENUNJUKKAN PENANGGUNG JAWAB DAN PEMAKAI  
KENDARAAN DINAS NOMOR : 551/06/KEP/DISHUB-LK/I/2019 TANGGAL 2 JANUARI 2019  
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

#### KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang** :
- bahwa dengan terjadinya mutasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota, maka perlu diatur pemakai dan penanggung jawab kendaraan dinas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota, penunjukan penanggung jawab dan pemakai kendaraan dinas ditetapkan berdasarkan beban tugas;
  - bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  - Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima

Puluh Kota Tahun 2019 ( Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10);

8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 145 );
9. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 397 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019.

**Memperhatikan :** Persetujuan DPA OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk penanggung jawab dan pemakai kendaraan dinas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pada saat jam kerja atau dalam keadaan tertentu, kendaraan dinas tersebut dapat digunakan oleh staf Dinas Perhubungan lainnya untuk kelancaran tugas dan kepentingan dinas.
- KETIGA** : Penanggung jawab dan pemakai kendaraan dinas tersebut harus memperhatikan dan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Bagi personil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dan pemakai kendaraan dinas tidak mutlak menguasai kendaraan tersebut, sewaktu-waktu dapat ditarik dan dipergunakan untuk kepentingan dinas lainnya;
  2. Kendaraan tersebut setiap harinya harus berada di lingkungan Instansi masing-masing kecuali jika sedang dipergunakan untuk kepentingan dinas ke luar daerah;
  3. Kerusakan kendaraan dan pembayaran pajak ditanggung oleh pemakai jika biaya pemeliharaan dari dinas tidak tersedia;
  4. Apabila si pemakai dialih tugaskan ke tempat lain, kendaraan dinas tersebut harus diserahkan kembali kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota atau karena pertimbangan tertentu kendaraan dapat ditarik oleh Kepala Dinas tanpa menuntut biaya yang telah dikeluarkan oleh pemakai;
  5. Apabila ada pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, kendaraan dinas tersebut sewaktu-waktu bisa ditarik dari pemakai dan kepadanya akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
  6. Bagi personil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dan pemakai kendaraan Dinas berkewajiban untuk membayar retribusi parkir dan retribusi pemakaian kekayaan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Kendaraan dinas beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) *seminggu dalam setahun* harus diserahkan kepada Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan pemeliharaan;
- KELIMA** : Dengan diterbitkannya keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 551/ 06 /KEP/DISHUB-LK/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 yang mengatur tentang hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2019 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Tanjung Pati  
Pada tanggal : 31 Juli 2019

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
 NOMOR : 551/ 371 /KEP/DISHUB-LK/VIU/2019  
 TANGGAL : 21 JULI 2019  
 TENTANG : PERUBAHAN PERTAMA PENUNJUKKAN PENANGGUNG JAWAB DAN PEMAKAI KENDARAAN DINAS  
 NOMOR : 551/06/DISHUB-LK/VIU/2019 TANGGAL 2 JANUARI 2019 DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN  
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

No	NAMA PEMAKAI	PLAT NOMOR	JENIS KENDARAAN		TAHUN PEMBELIAN	RETRIBUSI (Rp)	TOTAL UNIT	KET
			RODA 2	RODA 4				
1	Ir H. Anharman	BA 29 C	-	1	2014	40.000	1	
2	Aldasman, S Pd	BA 1935 C	-	1	2009	40.000	1	
3	Irvandi, SH	BA 1920 C	-	1	2003	30.000	1	
4	Erizal, S ST	BA 1983 C	-	1	2003	30.000	1	
5	Mukni	BA 1909 C	-	1	1994	18.000	1	
6	Muhammad Ali Akbar, S Sos	BA 9998 C	-	1	2007	40.000	1	
7	Nurmi Yenti, S Sos	BA 3842 C	1	-	2013	6.000	1	
8	Alfizon, S ST	BA 4122 C	1	-	2014	6.000	1	
9	Jeni Ade Candra	BA 3730 C	1	-	2011	6.000	1	
10	Alhyar, SE MM	BA 3841 C	1	-	2013	6.000	1	
11	Dadang Eni Putra, S ST	BA 3910 C	1	-	2013	6.000	1	
12	Notaldi, S Sos	BA 5013 C	1	-	2011	6.000	1	
13	Boy Chandra, S Sos	BA 3909 C	1	-	2013	6.000	1	
14	Romy	BA 6880 CF	1	-	1992	3.000	1	
15		BA 6901 CF	1	-	2002	-	1	Pool
16		BA 1904 C	-	1	1997	-	1	Pool
17		BA 8831 C	-	1	2017	-	1	Pool
	Jumlah		9	8		243.000	17	

Mengetahui  
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

  
 I. H. ANHARMAN  
 NIP. 19640103 199003 1 010

Tanjung Pati, 21 Juli 2019  
 PENGURUS BARANG

  
 ROMAZIKO  
 NIP. 19830807 201001 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Alamat : Jl. Mr. Syafruddin Prawira Negara Km. 7 Tanjung Pati, Kec. Harau - Kode Pos 26271  
Telp ☎. (0752) 7754203 Faks ☎. (0752) 7750136  
E-Mail : dishub50kota@gmail.com, Website : [Http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/](http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**  
**NOMOR : 551/ 05 /SK/DISHUB-LK/I/2019**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)**  
**SEBAGAI PENUNJANG KEGIATAN OPERASIONAL**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota yang optimal dan profesional dan mendukung maksimalnya pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota, Perlu pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi kegiatan Operasional di Lapangan;
  - b. Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana dimaksud huruf a diatas diberikan kepada Pejabat eselon II, Eselon III dan Eselon IV, Fungsional Umum dan Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota,
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Pengguna Anggaran;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 4614);
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Perubahannya Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10)
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 64):
14. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 397 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2016 Tanggal 30 maret 2016 Tentang Tata Tertib Administrasi Belanja Bahan Bakar Minyak;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana Penunjang Kegiatan Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- KEDUA : Pemberian Bahan bakar Minyak (BBM) sebagaimana dimaksud diberikan buntut mendukung pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten lima Puluh Kota
- KETIGA : Batas Maksimal Penggunaan Bahan Bakar Minyak /Bulan adalah Sebagai Berikut :

Eselon	Jumlah Liter
Eselon II b	300 Liter
Eselon III a	150 Liter
Eselon IV a	65 Liter
Fungsional Umum	30 Liter
Tenaga Harian Lepas (THL)	10 Liter

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tanjung Pati  
Pada tanggal : 02 Januari 2019

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**Ir. H. ANHARMEN**

NIP. 19640102 199003 1 010

**Tembusan** Disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan) di Sarilamak
2. Kepala Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Ketinggian
4. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Alamat : Jl. Mr. Syafruddin Prawira Negara Km. 7 Tanjung Pati, Kec. Harau - Kode Pos 26271  
Telp ☎. (0752) 7754203 Faks ☎. (0752) 7750136  
E-Mail : dishub50kota@gmail.com, Website : [Http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/](http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**  
**NOMOR : 551/ 388 /SK/DISHUB-LK/X/2019**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN PERTAMA PEMBERIAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)**  
**SEBAGAI PENUNJANG KEGIATAN OPERASIONAL NOMOR : 551/05/SK/DISHUB-LK/I/2019**  
**TANGGAL 2 JANUARI 2019**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota yang optimal dan profesional dan mendukung maksimalnya pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota, Perlu pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi kegiatan Operasional di Lapangan;
- b. Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana dimaksud huruf a diatas diberikan kepada Pejabat eselon II, Eselon III dan Eselon IV, Fungsional Umum dan Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota,
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Pengguna Anggaran;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 4614);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Perubahannya Nomor 70 Tahun

2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10)
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 64):
14. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 397 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Surat Ederan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2016 Tanggal 30 maret 2016 Tentang Tata Tertib Administrasi Belanja Bahan Bakar Minyak;

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

- PERTAMA** : Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana Penunjang Kegiatan Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- KEDUA** : Pemberian Bahan bakar Minyak (BBM) sebagaimana dimaksud diberikan buntut mendukung pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten lima Puluh Kota
- KETIGA** : Batas Maksimal Penggunaan Bahan Bakar Minyak /Bulan adalah Sebagai Berikut :

<b>Eselon</b>	<b>Jumlah Liter</b>
Eselon II b	300 Liter
Eselon III a	200 Liter
Eselon IV a	65 Liter
Fungsional Umum	30 Liter
Tenaga Harian Lepas (THL)	10 Liter

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2019 dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tanjung Pati  
Pada tanggal : 01 Oktober 2019

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**Ir. H. ANHARMEN**

NIP. 19640102 199003 1 010

**Tembusan** Disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan) di Sarilamak
2. Kepala Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Ketinggian
4. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya